

ANALISA

1978 — 10

SUMPAH PEMUDA

dan

Persatuan Indonesia



CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES



ANALISA

Diterbitkan oleh CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) sebagai terbitan berkala yang menyajikan analisa-analisa peristiwa dan masalah internasional dan nasional, baik ideologi dan politik maupun ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan, yang ditulis oleh Staf CSIS. Tetapi ANALISA juga menerima tulisan-tulisan dari luar CSIS dan menyediakan honoraria bagi karangan-karangan yang dimuat. Tulisan-tulisan dalam ANALISA tidak selalu mencerminkan pandangan CSIS.

Pemimpin Redaksi/

Penanggung jawab : Kirdi DIPOYUDO

Dewan Redaksi

: Daoed JOESOEF, Rufinus LAHUR, J. PANGLAYKIM, A.M.W. PRANARKA, M. Hadi SOESASTRO, Harry TJAN SILALAHI dan Jusuf WANANDI

Redaksi Pelaksana : Kirdi DIPOYUDO, Rufinus LAHUR

STT : S.K. Menpen R.I. No. 509/SK/DITJEN PPG/STT/1978, tgl. 28—8—1978

Harga per eks : Rp. 700,—

Harga langganan 1 tahun (12 nomor) : Rp. 8.000,— (bayar di muka), untuk Mahasiswa Rp. 7.200,— sudah termasuk ongkos kirim.

Redaksi : Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta Pusat,
Telepon 356532-5

Tata Usaha : Biro Publikasi CSIS, Jalan Kesehatan 3/13,
Jakarta Pusat, Telepon 349489

PENGANTAR REDAKSI

756

SUNARIO,

ARTI SUMPAH PEMUDA, NASIONAL DAN INTER-
NASIONAL

759

Abdurrachman SURJOMIHARDJO,

SUMPAH PEMUDA DI DALAM PERKEMBANGAN
BUDAYA-POLITIK INDONESIA 1900-1945

769

Kirdi DIPOYUDO,

MENGGALANG PERSATUAN BANGSA INDONESIA 788

Achmad MUGALIH,

BAHASA INDONESIA DAN INTEGRASI NASIONAL 801

Kirdi DIPOYUDO,

PANCASILA DAN KEBUDAYAAN NASIONAL INDO-
NESIA

813

DAFTAR PUBLIKASI CSIS

821

PENGANTAR REDAKSI

Dari semua Kongres Pemuda Indonesia yang pernah diadakan selama ini Kongres Ke-II, yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 27-28 Oktober 1928, ternyata paling banyak mendapat perhatian. Hal ini adalah karena dua hal: pertama, isi putusan yang diambil oleh kongres itu memang mencerminkan semangat jamannya; dan kedua, sejarah telah membuktikan bahwa putusan itu telah membawa perubahan yang mendasar pada perkembangan perjuangan nasional selanjutnya, termasuk diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno-Hatta sebagai wakil rakyat Indonesia yang telah menjadi satu bangsa.

Kini 50 tahun kemudian masyarakat bangsa Indonesia memperingati putusan kongres yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda itu dengan melakukan macam-macam kegiatan seperti kongres nasional bahasa Indonesia, loka karya pembinaan generasi muda, kongres pemuda/KNPI ke-II, dan berbagai ulasan melalui media komunikasi massa. Semuanya itu mengungkapkan betapa besarnya perhatian dan bahkan kekaguman orang atas peristiwa bersejarah 50 tahun yang lalu itu. Kenyataan ini juga merupakan bukti dan pengakuan bahwa makin besar perubahan sosial yang dilakukan orang pada suatu waktu makin besar pula dorongan untuk memperhatikannya dan belajar dari padanya.

Dalam pelbagai ulasan yang ditampilkan sehubungan dengan Sumpah Pemuda dan peranan pemuda nampak secara tersurat maupun tersirat adanya harapan agar generasi berikutnya dapat berperanan sesuai dengan panggilan sejarah, yaitu mengisi kemerdekaan melalui kegiatan pembangunan yang bermafaat bagi seluruh masyarakat.

Dalam rangka itu pula ANALISA kali ini ikut menyajikan pelbagai pemikiran yang ada hubungannya dengan Sumpah Pemuda itu. M. SUNARIO khusus menyoroti artinya, baik nasional maupun internasional. Penulis tidak saja mempunyai perhatian besar atas gerakan pemuda, tetapi juga ikut aktif dalam Kongres Pemuda Ke-II itu dan bahkan menjadi salah seorang pembicara, di samping Muhammad Yamin, S. Mangunsarkoro, Nona Purnomo Wulan dan lain sebagainya. Tulisan ini dapatlah kita anggap sebagai semacam kesaksian pribadi seorang pejuang yang ada baiknya diketahui oleh generasi-generasi berikutnya.

Lain halnya dengan tulisan yang kedua. Sebagai salah seorang pengamat sejarah Abdurrachman SURJOMIHARDJO membahas Sumpah Pemuda di dalam perkembangan budaya-politik Indonesia dalam periode 1900-1945. Karangan ini adalah sekedar ikhtisar, suatu kerangka perkembangan, suatu cara untuk dapat memahami hubungan pergerakan-pergerakan kebangsaan Indonesia dalam jalinan sejarah bangsa. Tema pokoknya ialah perjuangan pemakaian kata Indonesia dan Bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa, sebagai salah satu aspek perkembangan budaya-politik pada jaman kolonial. Uraianya bersumber pada kesadaran dan penghayatan sejarah tentang suatu peristiwa sejarah yang tidak dialami sendiri tetapi diketahui melalui pembacaan.

Dalam karangan yang ketiga Kirdi DIPOYUDO berusaha mengulas Sumpah Pemuda satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa sebagai faktor penting dalam usaha menggalang persatuan bangsa Indonesia. Biarpun pada waktu itu lebih merupakan cita-cita daripada kenyataan, Sumpah Pemuda itu dapat dipandang sebagai lahirnya bangsa dan kebudayaan nasional Indone-

sia. Sumpah itu adalah suatu semboyan yang mengobarkan semangat kebangsaan dan sekaligus suatu program kerja yang secara berangsur-angsur berhasil menghimpun berbagai bangsa Nusantara menjadi satu bangsa Indonesia.

Dalam karangan berikutnya Achmad MUGALIH membahas Bahasa Indonesia dan integrasi nasional. Tulisan ini membicarakan bagaimana bahasa daerah Melayu yang semula adalah bahasa salah satu suku yang kecil lambat laun berkembang menjadi lingua franca Nusantara dan bahasa persatuan Indonesia. Hal ini mengungkapkan dua hal: pertama, betapa besarnya kemampuan potensiil bahasa Indonesia sehingga dapat berkembang menjadi unsur integrasi yang raksasa; dan kedua, betapa besarnya jiwa toleransi suku-suku bangsa yang besar seperti suku-suku bangsa Jawa dan Sunda yang mau menerima suatu bahasa minoritas kecil menjadi bahasa nasional Indonesia demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Karangan yang kelima dan terakhir dengan judul "Pancasila dan Kebudayaan Nasional Indonesia" ditulis oleh Kirdi DIPOYUDO. Sejarah menunjukkan bahwa Sumpah Pemuda adalah sangat penting dalam pergerakan nasional Indonesia karena dapat dipandang sebagai lahirnya bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia. Pancasila sebagai dasar falsafah negara, pandangan hidup dan moral bangsa Indonesia, adalah bagian inti serta jiwa kebudayaan nasional itu dan landasan ideal pengembangannya. Berkat peranan Pancasila dalam pengembangan kebudayaan itu, kebudayaan Nasional Indonesia menjadi strategi kehidupan masyarakat dan negara menuju tujuannya, yaitu kesejahteraan lahir batin selengkap mungkin bagi setiap dan semua warganya.

Oktober 1978

REDAKSI

ARTI SUMPAH PEMUDA, NASIONAL DAN INTERNASIONAL*

SUNARIO

Sebagai salah seorang peserta dan salah seorang pemrasaran pada Kongres Pemuda-pemuda Indonesia ke-II di Jakarta dari 27-28 Oktober 1928 yang akhirnya berhasil mencetuskan "Sumpah Pemuda" pada malam tanggal 28 Oktober 1928 di Jalan Kramat (Raya) No. 106, tentu saja penulis banyak memiliki kenang-kenangan yang sangat berharga mengenai peristiwa yang bersejarah dahulu. Tentang soal-soal yang dibicarakan dan siapa-siapa semua yang ikut berbicara, dapat dilihat dari Acara Kongres (Kerapatan) yang sebelumnya telah disiapkan. Dengan catatan bahwa tidak semua dapat dilaksanakan, karena misalnya arak-arakan (pawai) pandu-pandu terpaksa ditiadakan, karena larangan oleh pihak penguasa Belanda atau karena tidak datangnya pembicara, di antaranya Ki Hajar Dewantara dari Jogya.

Maka kenang-kenangan tadi penulis simpan dan pelihara dalam pikiran dan hatinya dengan sebaik-baiknya, karena tetap menggembirakan dan mengharukan. Lebih-lebih lagi karena "Sumpah Pemuda" itu terbukti besar, bahkan sangat menentukan artinya bagi pergerakan kemerdekaan nasional kita yang memuncak pada Proklamasi Kemerdekaan dari 17 Agustus 1945. Dengan ini jelaslah, dan demikian pula harus dimengerti oleh

* Karangan Prof. Sunario SH, bekas Menteri Luar Negeri RI (1953-1955), ini pernah dimuat dalam buku *45 Tahun Sumpah Pemuda* (Jakarta: Yayasan Gedung-gedung Bersejarah Jakarta, 1974), hal. 277-285

kita semua, bahwa hasil usaha angkatan pejoang-pejoang 1928 adalah diperlukan untuk dijadikan dasar dari usaha Angkatan pejoang-pejoang 1945. Yakni karena kita nyata baru hendak dapat merdeka hanya di atas kesadaran, bahwa kita ini "ber-tanah air satu, berbangsa satu dan berbahasa satu", yang ketiganya meliputi seluruh Indonesia (Baik ditekankan, bahwa yang dimaksudkan dengan sebutan "Angkatan" dari tahun ini atau tahun itu yakni bukan generasi secara biologis yang susul menyusul kira-kira setiap 25 tahun, melainkan yang merupakan "Angkatan Pejoang-pejoang" semata-mata).

Telah banyak kali penulis mendapat kesempatan untuk membentangkan di muka corong radio atau dalam rapat-rapat peringatan di dalam dan di luar negeri, tentang maksud dan makna "Sumpah Pemuda" itu. Di antaranya pada Pertemuan Peringatan Sumpah Pemuda yang diselenggarakan oleh Fakultas Sastra Universitas Indonesia di Kramat Raya 106 Jakarta, pada 28 Oktober 1969, di mana atas permintaan Panitia Penyelenggara, penulis memajukan sebuah "Risalah Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia II" (dimuat dalam terbitan *Sesudah 45 tahun, 28 Oktober 1928 — 28 Oktober 1973*, penerbit: Idayu. Untuk singkatnya dipersilahkan saja membacanya).

Telah mudah sesungguhnya sekarang ini, untuk meneliti kembali bahan-bahan mengenai program, masalah-masalah yang dipersoalkan, nama para pembicara, jalannya pembicaraan dan keputusan Kongres itu, setelah tertulisnya Skripsi dari Drs. Suwarno pada IKIP di Jakarta pada tahun 1965 tentang "Sumpah Pemuda" (1928). Sarjana ini telah berhasil menemukan kembali banyak bahan dari surat-surat kabar, dan lain-lain di Perpustakaan Museum Pusat kita di Jakarta, selain mengadakan wawancara-wawancara terpisah dengan Saudara-saudara Sugondo Djojopuspito bekas Ketua PPPI yang memimpin Kongres tersebut dan beberapa peserta: (Prof. Dr.) Sarwono Prawirohardjo, (alm) Sartono S.H., Wongsonegoro SH dan penulis sendiri (kemudian malahan masih menyusul karangan-karangan dari pihak-pihak lain-lain yang berhasil melengkapi lagi bahan-bahan yang mungkin akan lenyap sama sekali jika tidak digali kembali

secepat-cepatnya. Surat-surat kabar di Museum Pusat dari periode sekitar 1928 juga telah banyak yang hampir hancur kertasnya).

Tetapi, meskipun "Sumpah Pemuda" itu telah banyak mendapat perhatian dan sorotan dari kita, namun masih saja mendorong penulis untuk menjelaskan tentang suatu segi yang nyata dirasakan belum begitu jelas mengenai peristiwa yang maha penting itu.

Bahwa "Sumpah Pemuda" memiliki arti nasional yang luhur bagi kita bangsa dan rakyat Indonesia sudah terang sekali. Tetapi, jika dihubungkan dengan kejadian-kejadian lain, yakni bukan saja dengan perjuangan kemerdekaan seluruhnya di dalam negeri, melainkan juga dengan yang terjadi di bidang itu di luar negeri, juga sebagai bagian dalam proses perjuangan untuk kemajuan dan demokrasi modern di seluruh dunia, maka terasalah bahwa penjelasan lebih lanjut masih sangat diperlukan. Biarpun juga secara ringkas saja.

Karena hubungan, khususnya dengan kejadian-kejadian di dunia internasional yang tersebut terakhir tadi memang terdapat secara positif, bahkan banyak ikut menentukan jalannya sejarah di Tanah Air kita sendiri, termasuk lahirnya "Sumpah Pemuda" itu. Meskipun benar juga, bahwa di Indonesia sendiri belum pernah terdapat sesuatu periode yang sepi sama sekali dari usaha-usaha perlawanan terhadap penjajah, yakni secara besar-besaran di bawah Sultan Agung, di Aceh, di bawah Pangeran Diponegoro dan lain-lain sebagainya.

Tetapi terutama sekali tak boleh diabaikan atau dilupakan, bahwa khususnya dengan permulaan abad XX seluruh benua Asia dan Afrika menginjak zaman modern yang cerah, yang membawa angin baru, sehingga timbul kata-kata *Renaissance* (kebangkitan kembali) dari benua Asia. "Fajar menyingsing" di Dunia Timur, dan sebagainya, yang mengandung banyak *political* dan *social change* itu.

Jadi *missing link* yang biasanya terdapat dalam tujuan-tujuan tentang peristiwa-peristiwa dalam pergerakan nasional kita itu, perlu diketemukan dan mendapat sorotan kembali.

Maka mulai dengan percobaan-percobaan oleh perintis-perintis perjuangan nasional kita di awal abad XX, khususnya usaha-usaha Ibu Raden Adjeng Kartini dan Dr. Wahidin Sudirohusodo dahulu itu tidak lepas dari perobahan besar yang terjadi, terutama di Asia. Ini (yang mengesankan sekali) malahan berlangsung *sebelum* terjadinya kemenangan Jepang dari Asia yang gilang-gemilang itu terhadap Rusia dari Barat (1905) yang mengembalikan secara menanjak sekali kepercayaan bangsa-bangsa Asia (Timur) pada kemampuan diri sendiri.

Kita baik memperhatikan dan merenungkan isi surat-surat yang terkumpul dalam buku *Door duisternis tot licht* dari Ibu Kartini yang disebut oleh J.S. Furnival (Nederlands Indie) sebagai perintis pertama dari perjuangan nasional kita, dan kedua: karangan-karangan dari Dr. Wahidin Sudirohusodo dalam majalah *Retno Doemilah* (dalam bahasa Jawa dan "Melayu"), kedua-duanya tertulis di sekitar tahun 1900. Kedua-duanya mengandung cita-cita nasional luhur yang tidak terbatas pada pulau Jawa semata-mata. Dari Ibu Kartini tidak hanya mengenai pendidikan semata-mata, bagaimana pentingnya juga soal-soal itu.

Dengan lahirnya abad XX itu di Indonesia timbul, apa yang waktu penulis masih kecil (penulis lahir tanggal 28 Agustus 1902) terkenal sebagai "zaman kemajuan". Disebut demikian, karena segala-gala mulai maju: pendidikan, sampai juga bagi kaum wanita (dibukanya beberapa *Hoofdenschool* untuk pangrehpraja "bumi putra", kemudian "Sekolah Dokter Jawa" di Jakarta, mulai diterimanya anak-anak dari golongan elite kita di sekolah-sekolah Belanda, termasuk HBS dan sebagainya), timbulnya perkumpulan-perkumpulan yang beberapa di antaranya kemudian lambat-laun menjadi partai-partai politik yang bercorak beraneka-ragam (agama, kesukuan, kepulauan), kepanduan dan sebagainya. Sampai modernisasi (secara Barat) mempengaruhi

pakaian, mulai dengan pakaian anak-anak. Ini semua dapat terjadi setapak demi setapak karena dorongan dari hati kita sendiri, meskipun pikiran-pikiran " kaum muda" juga agak menggelisahkan kalangan-kalangan kita yang masih berjiwa konservatif atau feodal. Perkembangan ini dipercepat dengan masuknya berita-berita tentang kemajuan-kemajuan yang terjadi di Eropa. Mengenai keadaan zaman permulaan *nation-building* kita itu penting thesis Dr. Akira Nagazumi: *The dawn of Indonesian Nationalism, The early years of the Budi Utomo, 1908 — 1918*, Tokyo, 1972.

Keadaan ekonomi kita, khususnya di Jawa tetap suram sekali, bahkan begitu merosot, sehingga dianggap perlu untuk diadakan penyelidikan resmi tentang adanya *mindere welvaart, Cultuurstelsel, landrente, erfpacht* dan *herendienst* masih terus merajalela, *poenale sanctie* untuk kuli-kuli kontrakan kita berjalan terus, meskipun ada maksud "melunakkan" sedikit-sedikit tekanan-tekanan yang disinyalir juga oleh Ibu Kartini, dengan dimulai *ethische politiek* (tetapi yang tidak dijalankan secara jujur).

Masih terus dipertahankan larangan mutlak (sampai 1919) untuk berserikat dan berkumpul dalam *Regeringsreglement*, berdampingan dengan "hak-hak exorbitant" dari gubernur-jenderal (pembuangan secara tiga macam). Unsur-unsur rasialisme pun terasa terdapat dalam kolonialisme Barat itu. Akan tetapi ajaibnya, penderitaan-penderitaan kita sebagai *inlanders* malahan merupakan rabuk yang sangat menyuburkan berkembangnya dan makin meratanya nasionalisme dan rasa demokrasi kita sampai berangsur-angsur meliputi seluruh Nusantara. Sehingga tepatlah apa yang dibentangkan dengan penuh keyakinan oleh Ernest Renan (1881), bahwa hakekat bangsa itu intinya terdapat dalam "keinginan untuk hidup bersama" (*le désir de vivre ensemble*), meskipun ada perbedaan rasial, agama dan sebagainya, berdasarkan memiliki dalam sejarah nasib bersama dalam suka dan duka, lebih-lebih dalam duka. Tinggal saja pada pemimpin-pemimpin yang mengerti tentang "panggilan-zaman" untuk menyalurkan emosi alamiah yang semakin mendalam dan

merata tadi secara *rasional-sistematis* dan mempercepat prosesnya ke arah tujuan-tujuan nasional yang normal pula, sesuai dengan yang dikehendaki zaman modern itu.

Yang dirasakan sangat penting yakni membina "bahasa persatuan" untuk mempercepat dan menyempurnakan *nation-building*. Oleh sebab itu tidak mengherankan, bahwa dengan munculnya golongan pemuda yang terdidik secara modern menurut standard internasional, timbulah berangsur-angsur perintis-perintis pergerakan kita yang mula-mula menuju ke arah persatuan kedaerahan (1908), kemudian kepersatuan dan kemerdekaan seluruh Indonesia (1928/1945).

Alhasil, segala usaha pihak penjajah untuk mengisolasi kita dari pengaruh pikiran-pikiran dan cita-cita politik universil, untuk membuat kita tetap terbelakang dalam segala-galanya yang dibutuhkan dalam dunia modern, dan untuk memecah-belah kita dengan politik *divide et-impera*-nya yang dianggapnya masih terus ampuh itu, segala usaha itu akhirnya kandas semuanya. Sikap pasif terhadap "panggilan suci" (*mission sacrée*) dari bangsa-bangsa berkulit putih dari Barat membalik menjadi ketidak-percayaan terhadap mereka, bahkan semakin naik kepercayaan kepada kekuatan dan kemampuan bangsa sendiri.

Dengan demikianlah "Kebangkitan Nasional" kita dengan berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang diilhami oleh Bapak Wahidin Sudirohusodo di bawah pimpinan murid-murid Stavia pemuda-pemuda Sutomo dan kawan-kawan. Itu terang tak dapat diceraikan dari, bahkan sedikit banyak dipengaruhi oleh gejala-gejala dan kejadian-kejadian yang bersejarah di negeri-negeri lain di Asia dalam menghadapi kekuasaan Barat, di mana di antaranya tercatat kemenangan besar dari Jepang terhadap Rusia di tahun 1905 tersebut. Jadi "Kebangkitan Nasional" kita itu hanya merupakan suatu bagian dari *Awakening of the East* yang tidak ingin terus merasa ketinggalan dalam perkembangan kemajuan di dunia dengan tetap merasa-kalannya saja dengan Barat di segala lapangan.

Budi Utomo disusul dengan berdirinya perkumpulan-perkumpulan murid-murid sekolah menengah: *Tri Koro Dharmo* (1915) yang kemudian menjadi *Jong Java* (1918) dengan kepan-duannya, *Jong Sumatra* (1917) dan sebagainya. Begitu pula kemudian, perjoangan pemuda-pemuda kita yang di sekitar tahun 20-an telah berjiwa "Kebangsaan Indonesia" yang memuncak pada malam 28 Oktober 1928 dengan "Sumpah Pemuda", itupun tidak dapat dikatakan berdiri sendiri. Sebab ia merupakan juga suatu mata rantai dalam serentetan perjuangan untuk "persatuan dan kemerdekaan nasional", anti kolonialisme dan imperialism, serta anti rasialisme di seluruh benua kembar Asia dan Afrika sehabis Perang Dunia I (1914-1918), yang juga bersifat perjuangan umum untuk cita-cita demokrasi. Hanya karena masih kuatnya kekuasaan Belanda dan Barat pada umumnya baru persatuan bangsa, belum kemerdekaan, dapat dicapai, tetapi dengan kesadaran penuh bahwa persatuan nasional (nasionalisme) itu merupakan syarat mutlak untuk mencapai kemerdekaan, seperti pondamen yang harus kuat bagi sebuah bangunan yang hendak didirikan. Kemerdekaan kita sendiri, sama halnya dengan kemerdekaan banyak bangsa-bangsa Asia dan Afrika lain, baru dapat terwujudkan setelah untuk kedua kalinya nama (*prestige*) Barat merosot, yakni dalam Perang Dunia II (1938-1945), bagi kita setelah negeri Belanda diduduki dengan kekerasan oleh Jerman (1940) dan Indonesia oleh Jepang (1942). Jadi baru 17 tahun kurang sedikit setelah Sumpah Pemuda yakni pada 17 Agustus 1945. Tetapi kebetulan juga cukup lama untuk membuat persatuan kita kukuh-kuat untuk bertahan terhadap usaha Belanda, yang dibantu oleh Sekutu-sekutunya, untuk *come-back* guna menjajah kita kembali. Juga cukup kuat guna mencegah perpecahan-perpecahan dari dalam (pemberontakan PKI di Madiun dan sebagainya).

Sebelumnya, yakni setelah berdirinya Budi Utomo, raksasa Cina pun bangkit dan menggulingkan kekuasaan Kaisar Manchu di bawah Sun Yat-sen dengan *San-Min-Chui*-nya (1911). Kejadian inipun ikut mempercepat tempo perjuangan nasional di tanah air kita, dengan berdirinya Sarekat (Dagang) Islam (1911) di bawah Haji Samanhudi yang kemudian bernama PSI, kemu-

dian lagi PSII (Bapak HOS Tjokroaminoto, Bapak Agus Salim, dr. Sukiman dan sebagainya). Tetapi juga terjadi bentrokan-bentrokan antara rakyat kita dengan penduduk Cina di sini, yang banyak mulai memotong "kucir"nya.

Juga Perang Tripoli antara Turki dan Italia (1911) yang gambarnya dipasang di mana-mana, di sini meskipun juga dikalahkan oleh Turki, menaikkan semangat pergerakan kita, terutama yang bercorak "agama Islam" yang dapat pengaruh dari pergerakan Pan-Islamisme. Tidak lama kemudian muncullah pergerakan *Insulinde* — NIP (1912) dipimpin oleh dr. Tjipto Mangunkusumo. Bapak Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantoro) dan Dr. Douwes Dekker di bawah panji-panji *Indisch Nationalisme* dengan pengaruh besar dari pihak golongan kaum "Indo" (sedikit banyak mencontoh Pilipina).

Tetapi khususnya setelah terjadi Perjanjian Perdamaian di Versailles (1919) yang mengakhiri Perang Dunia I menjadi semakin tegaslah tuntutan bangsa-bangsa, bukan saja di Eropa (Polandia, Tsekoslovakia, Yugoslavia dan sebagainya), melainkan juga di Asia dan sebagian Afrika (Mesir dan lain-lain) untuk menentukan secara bebas hari depannya sendiri. Jadi bagi dunia Timur khususnya, bebas dari kolonialisme dan imperialisme Barat, dan hidup dalam "negara-negara kebangsaan" (*nation states*) sendiri yang modern, merdeka dan berdaulat. Sebab rakyat-rakyat di Asia dan Afrika pun ikut mendengar dan memperhatikan dengan seksama seruan nyaring dari Presiden Woodrow Wilson dari Amerika Serikat tentang "hak bangsa-bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri" (*right of national self-determination*) yang terpaku dalam "4 asas" dan "14 pasal"-nya yang termasyur itu. Maksudnya ialah untuk mencapai ketentraman dan perdamaian kekal di dunia, di mana hingga waktu itu diabaikan "asas kebangsaan" yang sesuai pula dengan tuntutan demokrasi & keadilan dan suaranya berkumandang sampai pelosok-pelosok benua Timur.

Di mana-mana secara revolusioner bangsa-bangsa mulai melontarkan pergolakan sengit untuk mencapai kemerdekaan-

nya (kembali) secara penuh: di Turki, di Mesir, di negeri-negeri Arab lain, di India. Dan dengan sendirinya Indonesia pun tidak suka ketinggalan sesudah berabad-abad dan banyak kali berusaha untuk memerdekaan dirinya, tetapi yang selalu masih menemui kegagalan saja. (Lihat bunyi Proklamasi Kemerdekaan dan Pembukaan Undang-undang Dasar '45).

Jadi nyatalah bahwa bukan saja "emosi" atau "sentimen", yakni keinginan untuk merdeka yang perlu terdapat pada kita, melainkan sangat dibutuhkan pula di sampingnya pembinaan kekuatan bangsa secara rasionil sistematis dan effektif. Dengan demikian proses kepersatuan dan kemerdekaan itu dapat dipercepat (ini adalah pendapat pula dari Bung Hatta dalam pidato pembelaannya di muka hakim di Den Haag, 1928 — "Indonesia vrij" terdapat dalam *"Verspreide Geschriften"*, Jakarta, 1952).

Maka ajaibnya ialah, bahwa di luar negeri, bahkan justru di negeri Belanda yang menjajah kita itu, mulai disusun oleh pemuda-pemuda kita kekuatan berupa ideologi dan program politik yang tepat untuk dilaksanakan kemudian secepat-cepatnya di Tanah Air, termasuk "Sumpah Pemuda" itu, dalam menghadapi kekuatan pihak penjajah dengan cukup harapan akan berhasil. Ini terjadi di kalangan perkumpulan mahasiswa-mahasiswa kita yang belajar di negeri Belanda. Perkumpulan itu didirikan sebagai *Indische Vereeniging* (1908, setelah berdirinya Budi Utomo), mula-mula untuk memelihara "keramah-tamahan" saja, tetapi kemudian menjadi aktif di bidang politik dan berganti nama menjadi *Indonesische Vereeniging* (1922), dan akhirnya Perhimpunan Indonesia 1925). Tokoh-tokohnya yang menonjol yakni terutama sekali dua pemuda Subardjo dan Moh. Hatta, yang kebetulan juga cukup lama mendapat kesempatan belajar di sana, sehingga dapat cukup waktu untuk memimpin secara mental-politis (banyak dari belakang layar) perhimpunan itu. Keadaan waktu itu tidak jauh berbeda dari yang nampak dalam sejarah perjuangan kemerdekaan India misalnya. Karena baik Mahatma Gandhi, maupun Jawaharlal Nehru dan lain-lain juga menjadi "matang" pikiran-pikiran dan keyakinan politiknya di negeri Inggeris yang menjajah India. Ini seringkali dilupakan.

Sebab-sebabnya terang: Udara di Eropa adalah lebih bebas bagi semua orang, juga bagi kita di sana, meskipun masih tidak luput di sana sini dari *spionage* secara kolonial dari pihak "Departement van Kolonien".

Hubungan dengan pemuda-pemuda dari negeri-negeri lain yang juga berjuang untuk kemerdekaan masih dapat diselenggarakan dengan mudah. Rasa memberontak timbul dengan sendirinya segera setelah timbul kesadaran tentang perbedaan antara kedudukan warga-negara suatu negara yang merdeka dan berdaulat di suatu pihak dan sebagai kawula (onderdaan) pemerintah jajahan di lain pihak.

Memang ada tokoh-tokoh kita tanpa pergi ke luar negeri telah dapat merasakan ketidak adilan dalam perlakuan-perlakuan rakyatnya secara dalam. Misalnya Ibu Kartini, dr. Wahidin Sudirohusodo, Bapak H.O.S. Tjokroaminoto, dr. Tjipto Mangunkusumo, Bapak Suwardi Suryaningrat, Bapak Agus Salim, Bung Karno dan sebagainya. Tetapi golongan ini waktu itu masih merupakan pengecualian. Dalam PI itulah tergembeng rasa nasionalnya dan patriotisme terhadap bangsa dan Tanah Air Indonesia sebagai keseluruhan dan dapat timbul cepat sekali keinginan untuk ikut berjoang bagi kemerdekaan Indonesia bersama rakyat sendiri yang harus mencari jalannya sendiri ke arah itu. Karena kerjasama dengan pihak penjajah, lebih-lebih lagi di bawah Gubernur-Jendral seperti Mr. D. Fock (1921-1926) sesudah diucapkan *November-beloften* (1918) nyata tidak mungkin, berdasarkan adanya perbedaan dalam kepentingan secara kekal (politik *self-help* dan *non-koperasi*).

Oleh pihak Belanda dianggap berbahaya sekali khususnya ikut sertanya wakil-wakil PI dalam Kongres ke-I dari "Liga melawan imperialisme dan penindasan kolonial" di Brussel (Pebruari 1927), di mana mereka bertemu dengan Jawaharlal Nehru dan lain-lain. Dengan aktivitas-aktivitasnya semacam itu, khususnya dalam periode 1923 — 1930, besar dan menentukan peranan PI terhadap jalannya sejarah pergerakan nasional Indonesia, termasuk "Sumpah Pemuda"

SUMPAH PEMUDA DI DALAM PERKEMBANGAN BUDAYA-PO- LITIK INDONESIA 1900 — 1945 SEBUAH IKHTISAR*

Abdurrachman SURJOMIHARDJO SS

PENGANTAR

Pertama-tama haruslah dijelaskan, bahwa penulis karangan ini tidak termasuk mereka yang mengalami dan memegang peranan sekitar peristiwa "Sumpah Pemuda 1928". Karangan ini semata-mata merupakan hasil pembacaan belaka, sehingga dalam nada dan pendekatannya akan berbeda dengan apa yang telah tertulis di dalam buku ini.

Berbagai aspek sekitar "Sumpah Pemuda", baik yang berupa kenangan, kesaksian serta pengalaman dalam pergerakan, seperti diungkapkan kembali oleh para saksi serta pemegang peranan, telah mampu menghidupkan kembali "semangat jaman" itu. Dalam bentuknya yang sekarang dapatlah dipandang sebagai sekelumit otobiografi mereka masing-masing, yang dalam penggolongan dokumen-dokumen sejarah termasuk bahan penelitian bagi penulisan sejarah. Nilai otobiografi, apalagi yang komprehensif, sangat besar artinya bagi ilmu pengetahuan, "karena banyak memuat faktor-faktor subjektif seperti segi-segi efektif, motivasi, harapan-harapan, pengalaman serta interpretasi dan konseptualisasi dari individu yang bersangkutan terhadap faktor-faktor itu. Gambaran tentang perkembangan pribadi seseorang mencerminkan keadaan masyarakat yang mengeli-

* Karangan ini pernah dimuat dalam buku *45 Tahun Sumpah Pemuda* (Jakarta: Yayasan Gedung-gedung Bersejarah Jakarta, 1974), hal. 291-304

linginya, ialah kelompok sosialnya, struktur dari stratifikasi sosial dan sebagainya”, demikianlah seorang sejarawan terkemuka Indonesia dewasa ini dalam menempatkan nilai otobiografi bagi penulisan sejarah.¹

Karangan ini hanyalah sekedar merupakan ikhtisar, suatu kerangka perkembangan, sebagai suatu cara untuk dapat ”memahami hubungan pergerakan-pergerakan kebangsaan kita dalam jalinan sejarah bangsa”, seperti tercantum dalam surat Ketua Yayasan Gedung-gedung Bersejarah Jakarta kepada penulis karangan ini.² Dalam beberapa hal dapat diketengahkan bahan-bahan dokumenter lain sebagai pembanding kenangan serta pengalaman para penulis buku peringatan ini. Tema pokok karangan ini ialah perjuangan pemakaian kata Indonesia dan Bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa, sebagai salah satu aspek perkembangan budaya-politik pada jaman kolonial.

Uraianya beralas kepada kesadaran dan penghayatan sejarah tentang peristiwa sejarah, yang tidak dialami sendiri, tetapi yang dapat diketahui melalui pembacaan kembali kepustakaan dan bahan-bahan dokumenter.

DARI BAHASA MELAYU KE BAHASA INDONESIA

Perkembangan Bahasa Melayu menjadi Bahasa Indonesia, yang kini menjadi Bahasa Nasional Republik Indonesia, sejak lama telah menjadi bahan pembicaraan luas.³ Bahasa Melayu

1 Sartono Kartodirdjo, ”Metode Penggunaan Bahan Dokumen”, dalam Koentjaraningrat (red.), *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta 1978, hal. 51-81. Lihat juga Louis Gottschalk, ”The Historian and the Historical Document”, dalam Louis Gottschalk, Clyde Kluckhohn and Robert Angel, *The Use of Personal Documents in History, Anthropology and Sociology*, New York 1945. Terbitan Social Science Research Council, Bulletin no. 53. Bandingkan dengan Koentjaraningrat, ”Metode Penggunaan Data Pengalaman Individu”, dalam Koentjaraningrat (red), *op. cit.*, hal. 185-202.

2 Pak Soediro, tertanggal 30 Januari 1974

3 Periksa S.T. Alisjahbana, *Dari Perjuangan dan Pertumbuhan Bahasa Indonesia*, Djakarta 1957.—, ”The Indonesian Language, By-product of Nationalism”, *Pacific Affairs*, XII, 1949, hal. 388—392. A. Tccuw, *A Critical Survey of Studies on Malay and Bahasa Indonesia*, 's-Gravenhage 1961.

yang aslinya merupakan bahasa kelompok suku-bangsa di kepulauan Indonesia, telah menjadi bahasa perdagangan pada masa lalu di pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia. Di samping itu dipergunakan dalam penyebaran agama Islam dan Kristen.

Pertentangan-pertentangan setempat, yang timbul berhubungan dengan kedatangan pedagang-pedagang Belanda dan berakhir dengan perjanjian-perjanjian dagang maupun politik banyak yang menggunakan bahasa Melayu di samping bahasa Belanda.

Sekolah-sekolah bumiputra yang kemudian didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada mulanya direncanakan untuk memakai bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Tetapi sejak awal abad ke-XX kepentingan daerah jajahan, yang memerlukan tenaga-tenaga rendahan yang mengerti bahasa Belanda menggeser kedudukan bahasa Melayu. Di kota-kota sekolah lebih banyak mengajarkan Bahasa Belanda.¹.

Sebaliknya perkembangan sosial di kota-kota menumbuhkan kelompok elite baru yang amat peka terhadap perubahan. Tanda-tanda pertama kepekaan terhadap perubahan itu dapat dilihat dengan lahirnya organisasi bercorak politik yang mencita-citakan kemajuan dan kemerdekaan bangsa, seperti Budi Utomo, Sarekat Islam dan *Indischē Partij*.²

1 J.J. Brugmans, *Geschiedenis van het Onderwijs in Nederlandsch-Indië*, Batavia-Groningen 1938

2 Mengenai kecenderungan pemikiran para pemimpin Budi Utomo tentang politik dan kebudayaan sampai tahun 1918, lihat studi Dr. Akira Nagazumi, *The Dawn of Indonesian Nationalism. The Early Years of the Budi Utomo, 1908—1918*, Tokyo 1972. Khusus mengenai kegiatan para pelajar di Jakarta dan berita-berita pers menjelang 20 Mei 1908 sampai Kongres BU yang pertama, lihat Abdurrachman Surjomihardjo, "Budi Utomo Cabang Betawi", *Budaya Djaja*, 62 (Juli) 1973, hal. 399—442. Mengenai Sarekat Islam, lihat Deliar Noer, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia, 1900—1942*, Singapore-Kuala Lumpur 1973, hal. 343—346. Sartono Kartodirdjo telah merekonstruksi kegiatan S.I. lokal, di mana massa

Sangat menarik untuk dicatat ialan mengenai bahasa yang dipergunakan di dalam kongres-kongres maupun publikasi organisasi itu. Budi Utomo mempergunakan bahasa Belanda, Jawa dan Melayu. Demikian juga *Indische Partij*, mula-mula menggunakan bahasa Belanda dan Melayu, kemudian setelah menjadi *Nationale Indische Partij*, juga bahasa Jawa dalam surat kabarnya.

Seorang wakil pelajar Indonesia di Nederland, yang telah aktif dalam gerakan nasional, dalam kongres *Indonesisch Verbond van Studeerenden* (Perserikatan Pelajar Indonesia) pada tahun 1918 di Wageningen telah mengusulkan agar bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah Indonesia.¹ Majalah pelajar-pelajar Indonesia di Nederland berjudul *Hindia Poetra*, tetapi isinya dalam bahasa Belanda.

pengikut S.I. bergerak. Lihat karangannya *Protest Movements in Rural Java*, Singapore-Kuala Lumpur 1973, hal. 142—185. Kedua studi itu mempergunakan surat-surat kabar dan dokumen pemerintah sebagai sumber. Dokumen pemerintah Hindia Belanda, terutama yang mengenai kegiatan para pemimpin S.I., terdapat dalam penerbitan sumber yang dikérjakan oleh S.L. van der Wal (ed.), *De Volksraad en de Staatkundige Ontwikkeling van Nederlandsch-Indië*, Eerste stuk (1981-1926), Tweede Stuk (1927—1942), Groningen 1965. (selanjutnya S.L. van der Wal, *De Volksraad*). Juga S.L., van der Wal (ed.), *De Opkomst van de Nationalistische Beweging in Nederlands-Indië*, Groningen 1967 (selanjutnya S.L. van der Wal, *De Opkomst* ...) *Indische Partij* adalah organisasi golongan Indo (Eurasia) yang berhasil menarik sekelompok cendekiawan Indonesia yang memiliki kecenderungan politik yang kuat dan radikal. Dokumen-dokumen Hindia Belanda mengenai *Indische Partij* termuat secara luas dalam S.L. van der Wal, *De Opkomst*, *passim*. Penerbitan I.P. dipakai dalam studi P.W. van der Veer, *Introduction to a socio-political study of the Eurasians of Indonesia*, Ph. D . Thesis Cornell University 1956. Dalam bentuk xerografi kini tersimpan dalam Perpustakaan LRKN-LIPI, Jakarta. Koleksi Perpustakaan Museum Pusat mengenai penerbitan IP telah pula dipergunakan penulis karangan ini. Lihat catatan (2) di bawah.

2 Lihat *Indië in de Nederlandsche Studentenwereld. Verslag van het Eerste Congres van het "Indonesisch Verbond van Studerenden"*, gehouden te Wageningen op den 29 sten, 30 sten en 31 sten Augustus 1918. Den Haag 1918. Laporan Kongres itu diterbitkan oleh *Indonesisch Persbureau* yang dipimpin oleh Suwardi Surjaningrat. Ikhtisar pembicaraan mengenai bahasa pengantar dalam kongres itu terdapat dalam Abdurrachman Surjomihardjo, "Suatu analisa cita-cita dan tindak perbuatan nasional revolusioner Suwardi Surjaningrat, 1913—1922", dalam *Medan Ilmu Pengetahuan*, III (April) 1962, hal. 476—480. Terjemahan bahasa Inggris terdapat di dalam *Madjalah Ilmu-ilmu Sastra Indonesia*, III, 1964, hal. 371—406.

Di Indonesia sendiri perkembangan pers berbahasa Melayu dinilai sangat penting peranannya, karena pers itu dapat langsung mencapai pembaca penduduk bumiputra, golongan penduduk yang terbanyak jumlahnya di samping golongan Belanda dan Tionghoa. Pada mulanya pers bahwa Melayu itu adalah milik modal Belanda dan Tionghoa, tetapi tidak jarang redaksinya merupakan campuran. Umumnya ada guru bahasa Melayu yang duduk dalam redaksi, demikian juga pembentu-penulis suratkabar. Peranan pers bahasa Melayu itu menjadi perhatian dua pengarang pertama tentang pers Indonesia, yang menulis dalm tahun 1909. ¹

Sebuah mingguan, yang kemudian menjadi harian, *Medan Prijaji* (1907—1912), merupakan penerbitan yang terpenting dalam rangkaian perkembangan awal pers Indonesia. Bukan saja karena modal dan penerbitnya adalah orang Indonesia, tetapi nada isinya yang jelas menunjukkan kesadaran penggunaan bahasa Melayu sebagai media untuk membentuk pendapat umum mengenai berbagai persoalan masyarakat dewasa itu. Pemimpinnya R.M. Tirtohadisurjo, kemudian diserahi tugas untuk memimpin surat kabar Sarekat Islam yang pertama dan terkemuka, yaitu *Sarotama* (1914).

I E.F.E. Douwes Dekker, "The Press", dalam Arnold Wright and T. Breakspear (eds), *Twentieth Century Impressions of Netherlands-India* London-Batavia 1909, hal. 261—268. A. Cabation, "La Presse indigène aux Indes Néerlandaises", dalam *Revue du Monde musulman*, VII, 1909, hal. 485-490. Penyusun pertama sejarah surat kabar Indonesia ialah Sudarjo Tjokrosisworo (ed.), *Kenangan Sekilas Sedjarah Perjuangan Pers Sebangsa*, Djakarta 1958. Pers Indonesia-Tionghwa, yang menggunakan bahasa Melayu Pasar, kedudukan dan peranannya di tengah-tengah perkembangan bangsa Indonesia, terdapat dalam uraian Kwee Kek Beng, "De Chineesche Pers in Nederlandsch-Indië", dalam *Koloniale Studien*, 9 jrg. 1935, hal. 194—224. Lihat juga otobiografi Kwee Kek Beng. *Doea poeloeh lima tahoen sebagai wartawan*, Batavia 1948. Suatu studi pendahuluan yang menyeluruh terdapat dalam Liauw Kian Djoe (Leo Suryadinata), *Pers Indonesia Tionghwa dan Pergerakan Kemerdekaan* (1901—1942). Skripsi Sarjana Jurusan Sejarah. Fakultas Sastra U.1. 1965. Juga dalam Leo Suryadinata, *The Pre-World War II Peranakan-Chinese Press of Java*, Ohio University Center for International Studies 1971.

Sejak tahun 1923 elite baru yang terdiri dari mahasiswa Indonesia di Nederland memimpin dan mengarahkan idea Indonesia sebagai pengertian politik dan identitas bangsa. Organisasi mereka berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia dan majalahnya bernama *Indonesia Merdeka*.¹ Kata Indonesia yang semula dikenal mereka dalam kepustakaan etnologi, ditingkatkan sebagai identitas mereka. Sebagai kelanjutan idea identitas Indonesia itu, maka di Indonesia pada tahun 1927 didirikan Partai Nasional Indonesia. Dari namanya saja sudah merupakan identitas politik baru, yang mengatasi pengertian dan batas-batas suku bangsa di Indonesia.²

Elite Indonesia baru, yang semula hanya pandai bahasa daerah dan bahasa Belanda, melihat kemungkinan pemakaian bahasa Melayu sebagai alat komunikasi politik. Hal inipun secara bersamaan disadari dan diketahui akan bahayanya oleh pejabat-pejabat Hindia Belanda.

1 Terbit dalam bahasa Belanda, tetapi sejak tahun 1927 telah ada karangan dalam bahasa Indonesia. Pernah pula terbit dalam bahasa Indonesia, tetapi hanya sampai lima nomor. Mengenai Perhimpunan Indonesia dan peranannya dalam pergerakan nasional, periksa Mohammad Hatta, *Verspreide Geschriften*, Djakarta-Amsterdam-Surabaia 1952; dan *Kumpulan Karangan*, I-II, Djakarta-Amsterdam-Surabaia 1953. Lihat juga *Gedenkboek Indonesische Vereeniging 1908—1923; Jubileum Nummer Perhimpunan Indonesia 1908—1938*. Sangat menarik untuk diperhatikan ialah karangan-karangan Suwardi Surjaningrat, "De Indische Vereeniging. een Radicale Hervorming, 1908—1918", di dalam *De Beweging*, 29 Maart 1919, Noto Soeroto, "De Eerste organisatie van Indonesiërs in Nederland". *Indische Gids*, LI, 1929; hal. 238 — 242. Suatu rekonstruksi sejarah berdasarkan pengalaman sendiri dan pembacaan sumber-sumber telah dibuat oleh Prof. Soenario S.H. *Perhimpunan Indonesia dan Peranannya dalam Perjuangan Kemerdekaan kita*, kertas-kerja pada Seminar Sedjarah Nasional II, 26—29 Agustus 1970 di Yogyakarta. Juga Achmad Subardjo Djoyoadisuryo, "Kenang-kenangan akan Saudara Mohammad Hatta", dalam buku *Bung Hatta Mengabdi pada cita-cita perjuangan bangsa*, Djakarta 1972, hal. 117—138.

2 David Joel Steinberg dan lain-lain, *In Search of Southeast Asia. A Modern History*, New York 1971, hal. 296. Mengenai PNI dan perkembangannya periksa studi Bernhard Dahm, *Sukarnos Kampf um Indonesiens Unabhängigkeit. Werdegang Und Ideen eines asiatischen Nationalisten* (Perjuangan Sukarno untuk kemerdekaan Indonesia. Asalmula dan gagasan seorang nasionalis Asia), Frankfurt am Main-Berlin 1966. Buku Dahm ini telah terbit dalam terjemahan bahasa Belanda (Meppel t.t.) dan Inggris (Ithaca, 1969). Buku ini sangat penting sebagai pembanding otobiografi Ir. Sukarno, seperti telah dikisahkan kepada Ny. Cindy Adams, yang penyajinya banyak mengandung kesalahan-kesalahan.

Banyaknya kasus *persdelict* di masa Hindia Belanda, larangan terbit bagi brosur dan pers antara lain karena disadari bahayanya pengaruh tulisan dalam bahasa Melayu dalam pers itu segera dapat dipahami oleh penduduk bumiputra.

Suatu contoh yang terkenal dan diketahui umum ialah terbitnya risalah *Als ik eens Nederlander was* di dalam bahasa Belanda dan Melayu pada tahun 1913, yang segera dilarang untuk diedarkan. Risalah itu diterbitkan untuk mengecam perayaan seratus tahun kemerdekaan Nederland (dari jajahan Perancis), yang akan diadakan di Indonesia (yang masih dijajah Belanda).

Demikianlah beberapa peristiwa sebelum diadakannya Kongres Pemuda Indonesia ke-II di Jakarta.

GEMA "SUMPAH PEMUDA INDONESIA RAYA"

Dalam hubungan karangan ini, keputusan Kongres Pemuda ke-II itu, bahwa "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia" merupakan perumusan yang tepat sekali dari kesadaran yang secara lambat berkembang pada tahun-tahun sebelumnya.

Sejak itu penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai kesempatan sejalan dengan kesadaran identitas Indonesia. Latar belakang budaya dan sosial pemakai bahasa itu tercermin dalam karangan-karangan mereka. Karya Sastra Indonesia sebagai hasil "arsitek-arsitek bahasa Indonesia", baik sebagai terbitan Balai Pustaka maupun di luarnya menuju ke arah kesempurnaan penggunaan Bahasa Indonesia. *Poedjangga Baroe* yang terbit sejak tahun 1933 merupakan cermin kegiatan intelektual elite baru dan dengan sadar menggunakan Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi modern di tengah-tengah perkembangan ilmu dan teknologi.¹

1 Mengenai karya sastra Indonesia modern, lihat karangan-karangan Alisjahbana, Armijn Pane dan H.B. Jassin. Bibliografi karya mereka terdapat dalam buku A. Teeuw, *Modern Indonesian Literature*, The Hague 1967. Juga dalam Ajip Rosidi, *Ichitisar Sedjarah Sastra Indonesia*, Bandung 1969, hal. 224—238.

Gerakan pendidikan Taman Siswa, yang oleh banyak orang disebut, "mulai perjalanan hidupnya yang aneh itu dengan aksi untuk melindungi kebudayaan Jawa", sejak tahun 1930 para pemimpinnya "telah meninggalkan cita-citanya dan menerima prioritas kepentingan Bahasa Indonesia".

Demikian juga Perguruan Rakyat di Jakarta, yang para pendirinya berasal dari berbagai daerah Indonesia, corak dan tujuan ke-Indonesiaannya nampak benar. ¹

Sebuah Kongres Bahasa diadakan di Surakarta pada tahun 1938. Keputusan-keputusannya yang penting ialah gagasan untuk mendirikan sebuah lembaga dan sebuah fakultas untuk mempelajari bahasa Indonesia. Di samping itu membuat tata-bahasa baru sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam struktur bahasa. Bahasa Indonesia hendaklah dipakai sebagai bahasa Hukum dan sebagai alat pertukaran pikiran di dalam dewan-dewan perwakilan waktu itu. Tetapi keputusan itu hanya ada di atas kertas dan tidak satu lembagapun yang didirikan untuk melaksanakan keputusan kongres itu.

Dalam pada itu pers dan majalah yang mewakili ideologi agama, politik maupun kebudayaan terbit terus dengan bahasa Indonesia yang makin sempurna. Tiga tahun setelah "Sumpah Pemuda" Sutan Takdir Alisjahbana dalam majalahnya kaum wartawan (dahulu bernama jurnalis) menulis tentang peranan pers Indonesia sebagai berikut:

"Dalam waktoe bangsa kita dalam segala djoeroesan baha-roe moelai bangoen dan bergerak seperti sekarang ini, ta' adalah sesoeatoe yang lebih besar pengarohnya dari pers. Dalam doenia bahasa poen tiada terketjoeali. Soerat kabar, madjallah yang tiap hari beriboe-riboe berserak seloeroeh kepoelaoean

¹ Mengenai Taman Siswa lihat W. le Fèbre, *Taman Siswa ialah kepertjajaan kepada kekuatan sendiri untuk tumbuh*, Djakarta-Surabaja 1952. Ki Hadjar Dewantara, *Karya K.H.D. (Kumpulan Karangan)*, Jilid I-II, Jogyakarta 1962—1967; *Buku Peringatan Taman Siswa 30 tahun*, Jogjakarta 1952.

Indonesia ini, lambat laoen mempengaroehi bahasa yang dipakai oleh beriboe-riboe ra'jat Indonesia. Dan karena pada oemoemnya soerat kabar dan madjallah itoe dibatja orang yang agak terpeladjar, yang boleh berpengaroeh poela atas sekelilingnya, maka njata sekali, bahwa pengaroeh pers atas toemboehnya bahasa Indonesia, sangat besar, ja, boleh djadi jang paling besar sekali pada waktoe ini. Bahasa jang dipakai dan disebarluaskan pers itoe, perlahan-lahan, toeroen meresap kepada ra'jat yang oemoem”.

Lebih lanjut ia menulis ”Soempah pemoeda-pemoeda bangsa kita beberapa tahoen yang laloe, bahwa mereka hanja mengakoei *satoe* bahasa jaitoe *bahasa Indonesia*, ialah sesoeatoe kedjadian yang penting dalam sedjarah Indonesia, jang hanja kelak akan dapat dihargai oleh ahli sedjarah dengan sepenoeh-penoehnya. Tetapi dalam pada itoe, bagi kita jang menjetoedjoei dan memoedji soempah itoe, teranglah terpikoel soeatoe kewadibinan jang berat, tetapi soetji, oentoek beroesaha bersama-sama, mengangkat deradjat bahasa jang *satoe* itoe, menyoeboran dan menyempoernakannja agar dapat ditandingkan dengan bahasa mana sekalipoen di moeka boemi ini”.¹

Sangat menarik pula untuk diperhatikan ialah rangkaian polemik tentang kebudayaan Indonesia antara tahun 1935-1939, yang telah dilakukan oleh seorang sarjana hukum dan sasterawan (S.T. Alisjahbana), dua orang dokter dan politikus (Dr. Sutomo dan Dr. M. Amir), dua orang wartawan (Adinegoro dan Tjindarbumi), seorang guru dan sasterawan (Sanusi Pane), seorang sarjana ahli peneliti sejarah dan kebudayaan Indonesia kuna (Dr. Poerbatjaraka) dan akhirnya seorang politikus, pendidik dan budayawan (Ki Hadjar Dewantara), dengan menggunakan Bahasa Indonesia serta gaya masing-masing.²

1 Lihat majalah *Djoernalis. Orgaan Opisil dari Perserikatan Kaoem Journalist*, Jrg. I, No. 1 (November) 1931, hal. 8. Hanya satu nomor saja yang terbit. Komisi Redaksi terdiri dari Saeroen, Parada Harahap dan J. Manoppo. Mengenai berdirinya Perserikatan Kaoem Journalist itu lihat laporan Lauw Botak Sr. *Rateoe Doenia* atau beberapa hal yang penting dalam *Congres Journalisten Indonesia*. Jang dibikin koetika ddo. 8—9 Augustus '31 di Semarang. Semarang 1931.

2 Achdiat K. Mihardja, *Polemik Kebudayaan*, Djakarta 1948. Telah dicetak ulang berkali-kali.

Di dalam *Volksraad* (Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda), Fraksi Nasional di bawah pimpinan Mohamad Husni Thamrin, abang Betawi yang telah menjadi salah seorang pemimpin politik terkemuka waktu itu, melancarkan aksi menggunakan Bahasa Indonesia di dalam pidato-pidato di muka sidang. Itu terjadi pada tanggal 12 Juli 1938.¹ Reaksinya cukup hebat, baik di dalam maupun di luar *Volksraad*. Itulah usaha pertama untuk mendobrak penggunaan Bahasa Belanda di dalam perwakilan dan sebagai bahasa Hukum selama itu. Bila kita baca dokumen-dokumen waktu itu, maka adanya keberatan pejabat-pejabat Hindia Belanda berhubung aksi-aksi Fraksi Nasional itu antara lain karena dengan menggunakan bahasa itu makna dan arti perdebatan-perdebatan di dalam *Volksraad* akan segera dipahami oleh pers Indonesia dan rakyat umum.

Di jaman pendudukan Jepang terjadi perkembangan yang penting. Salah satu tindakan Jepang yang pertama ialah meniadakan Bahasa Belanda. Bahasa Jepang tidak dikenal, oleh karena itu pemerintah pendudukan terpaksa menetapkan penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, di kantor-kantor pemerintah dan di sekolah-sekolah.

Kesempatan berkembang semacam itu belum pernah terjadi sebelumnya. Bahasa Indonesia berkembang ke segala jurusan dan untuk pelbagai keperluan. Sebuah Komisi Bahasa didirikan dan jasanya yang terutama ialah: berhasil menetapkan istilah-istilah baru, membuat sebuah tatabahasa normatif dan menetapkan kata-kata baru dalam penggunaan bahasa sehari-hari.

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia menutup proses perkembangan itu, sebaliknya membuka kemungkinan-kemungkinan yang lebih luas bagi perkembangan bahasa nasional kita.²

1 S.L. van der Wal, *De Volksraad*, Tweede Stuk, hal. 369 — 376

2 A. Teeuw, *op. cit.* (lihat catatan 3 hal. 770). Suatu studi dengan pendekatan sosiologi tentang perkembangan Bahasa Indonesia ialah dari A.A. Bodenstedt, *Sprache und Politik in Indonesien*, Heidelberg 1966.

NAMA INDONESIA SEBAGAI IDENTITAS BANGSA

Pada bagian-bagian lain buku ini para pembaca mendapat gambaran dari para pelaku sejarah dan saksi-saksi peristiwa bersejarah tentang perjuangan ke arah kemajuan, penghapusan kemiskinan, penderitaan dan usaha-usaha mengatasi keterbelakangan dalam bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan. Penulis karangan ini ingin mengulang kembali kisah perjuangan sebuah nama, yang bagi rakyat jajahan pun perlu diperjuangkan. Sungguhpun untuk sebuah nama, yaitu Indonesia, namun dapatlah dikemukakan di sini justru nama itulah yang menjadi tujuan luhur, dengan arti dan maknanya yang berhasil menjiwai kaum nasionalis, dan kemudian juga diikuti oleh pelbagai golongan masyarakat di Indonesia.

Untuk mengikuti perkembangan itu kita menengok kembali ke belakang, yaitu berhubung dengan penerbitan pertama majalah *Indonesia Merdeka*, diterbitkan oleh Perhimpunan Indonesia di Nederland. Dalam nomor pertama tahun 1924, majalah itu mencatat dalam kata-pengantaranya:

”Kita memasuki tahun baru dengan pakaian baru dan nama baru. Pergantian nama itu bukanlah merupakan hasil khayalan secara tiba-tiba, tetapi hanya merupakan penarikan sebuah garis, yang dimulai dengan perubahan *Indische Verreniging* menjadi *Indonesische Vereeniging*”.¹

Di dalam nomor pertama itu dicatat, bahwa ”*Indonesia Merdeka* merupakan suara Indonesia Muda yang sedang belajar, suara yang pada waktu ini mungkin tidak terdengar oleh penguasa, tetapi yang pada suatu waktu pasti akan didengar Adalah merupakan suatu kesalahan untuk menganggap remeh suara itu, sebab di belakang suara itu berdiri kemauan pasti, untuk tetap merebut kembali hak-hak, cepat atau lambat untuk

¹ Teks asli dalam bahasa Belanda. *Indonesia Merdeka*, 2e jrg., No. 1 (Maart) 1924. ”Voorwoord” (Kata Pengantar).

menetapkan kedudukan atau keyakinan di tengah-tengah dunia, yaitu Indonesia Merdeka.”

Peristiwa pergantian nama itu dan perjuangan untuk mengganti nama *Nederlandsch-Indie* menjadi Indonesia telah dicatat oleh penyusun pertama Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia, J. Th. Petrus Blumberger.¹ Ia mencatat, bahwa sekitar tahun 1925 banyak organisasi yang berorientasi nasional memakai nama Indonesia dan ingin memberi isi politik ketatanegaraan ke dalam nama itu.

Pemakaian nama Indonesia sejak itu secara luas terdapat pada nama-nama surat kabar, organisasi dan judul karangan. Judul-judul seperti *Indonesia in de wereldgemeenschap* (Indonesia di tengah-tengah pergaulan dunia), *Indonesia di tengah-tengah Revolusi Asia* dan *De Vakvereeniging in Indonesia* (Seri-kat sekerdja di Indonesia) termuat dalam nomor lustrum 15 tahun berdirinya *Indische Vereeniging*, (1908-1923).

Nazir Dt. Pamuntjak, sebagai wakil P.I. di dalam Kongres Anti Imperialisme dan Kolonialisme di Brussel (10-15 Februari 1927) berpidato dengan judul *Indonesia en de Vrijheidsstrijd* (Indonesia dan perjuangan kemerdekaan). Nama Indonesia yang dipakainya itu dijelaskan kepada para pengunjung kongres sebagai berikut:

”Indonesia adalah kepulauan Hindia, terdiri dari Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan banyak pulau-pulau kecil lainnya dengan jumlah penduduknya sebanyak 50 juta.”² Di dalam majalah yang sama terdapat artikel yang menguraikan asal-usul pemakaian nama Indonesia, sejak dipakai oleh J.R. Logan dalam arti geografis (1850), kemudian dalam arti ethnolo-

1 J.Th. Petrus Blumberger, *De Nationalistische Beweging in Nederlandsch-Indië*, Haarlem 1931.

2 *Indonesia Merdeka*, 5e jrg. no. 1—2 (Maart—April) 1927, hal. 21

gis sejak A. Bastian (1884) dan kemudian dalam arti politik ketatanegaraan oleh kaum nasionalis Indonesia. Karangan itu merupakan uraian lebih lanjut dari karangan Kreemer dalam majalah *Het Koloniaal Weekblad*,¹ yang mempersoalkan dari mana asal nama Indonesia itu.

PERGERAKAN NASIONAL DAN NAMA INDONESIA

Sejak awal pergerakan nasional terasa perlunya untuk memakai sebuah kata yang menunjukkan tujuan pokok pergerakan, yaitu pembinaan bangsa dan wilayah Bangsa. Perkumpulan-perkumpulan yang bercorak kedaerahan pada mulanya tak merasa perlu mencari kata pemersatu itu. Tetapi sekali perkumpulan itu mengatasi batas-batas asal kedaerahan, maka menjadilah masalah untuk mencari penamaan yang tepat bagi organisasinya.

Demikianlah dapat kita catat, tatkala para mahasiswa di Nederland itu pada tahun 1908 akan mendirikan perkumpulannya, R.M. Noto Suroto mengusulkan nama Budi Utomo Cabang Nederland. Tetapi hal itu ditolak oleh dokter Apituley dari Ambon, karena BU bercorak kejawaan dan para mahasiswa tidak semuanya berasal dari Jawa. Ditetapkanlah kemudian nama *Indische Vereeniging* bagi perkumpulan itu.² Kaum Indo di Indonesia, menamakan organisasinya *Insulinde*, nama yang telah dipakai oleh Multatuli dalam abad ke-XIX. Waktu mereka mendirikan partai politik bersama dengan golongan lain di Indonesia, maka partainya bernama *Indische Partij*, sedang

1 "Waar Komt de naam Indonesië vandaan?", *Het Koloniaal Weekblad*, 3 Februari 1925, hal. 4. Bung Hatta dalam sumbangan karangan bagi buku ini meneatat kenangannya mengenai karangan Prof. van Volenhooven, *De Indonesië en zijn grond* (Orang Indonesia dan tanahnya) yang menjadi landasan *Indische vereeniging* dalam tahun 1921 memakai kata *Indonesië* dan *Indonesia*. Lihat juga *Indonesia Merdeka*, 5e jrg. no. 1—2 (Maart—April) 1927, hal 50—53 yang telah memuat karangan "lets over den naam Indonesia". Bung Hatta sendiri menulis tiga artikel mengenai penggunaan, pemakaian dan perjuangan nama Indonesia, lihat *Verspreide Geschriften*. Djakarta-Amsterdam-Surabaya 1952, hal. 343-352.

2 Dalam *Soembangsих Gedenkboek Boedi Oetomo: 1908 — 20 Mei — 1918*. Amsterdam 1918. Noto Soebroto telah melepaskan gagasannya dan ia mengusulkan kata *Indonesiers*. Lihat karangan Suwardi Surjaningrat tersebut dalam catatan (1) hal. 774.

konsep kewarganegaraannya dinamakan *Indiërs* atau Kaum Hindia.

Dalam artinya yang terbatas dan belum jelas, kata-kata *Indonesië* — *Indonesisch* dan *Indonesiër* makin banyak dipakai. Demikianlah tercatat R.M. Suwardi Suryaningrat mendirikan sebuah biro pers di Nederland dengan nama *Indonesisch Persbureau* pada tahun 1913.¹ Dr. Ratulangi diberitakan mendirikan sebuah kantor asuransi di Bandung dengan nama Asuransi Indonesia.² Kata Nusantara, yang berasal dari buku Negarakertagama karangan Mpu Prapanca dari jaman Majapahit, digemari pula oleh kaum nasionalis seperti Ki Hadjar Dewantara dan Sanusi Pane.

Dari semua itu, maka Perhimpunan Indonesia di Nederland yang melantingkan kata Indonesia dalam arti Politik-ketatanegaraan. Perumusannya tertuang dalam sebuah artikel di dalam majalahnya, dengan singkat dan jelas: "Indonesia sama artinya dengan *Nederlandsch Indië*, sebagai pengertian ketatanegaraan bagi *negara* Indonesia yang akan datang. Indonesia tidak hanya berarti telah tercapainya tujuan, tetapi kesatuan, kekuasaan untuk mewujudkan diri sendiri".³

Sambutan atas propaganda P.I. ialah dipakainya kata Indonesia oleh semua partai politik dan perkumpulan. Pemuda mengadakan Kongres-kongres dan pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta, dicanangkanlah Trilogi Sumpah Pemuda yang kini terkenal itu, nama INDONESIA dikaitkan dengan tujuan luhur mereka dalam usaha membina Bangsa yang satu, Tanah Air yang satu dan Satu Bahasa Persatuan.

Masa depan Indonesia Merdeka juga menjadi perspektif guru-guru besar Belanda di (Perguruan Tinggi Hukum) *Rechts hoger School* di Jakarta. Pandangan mereka semula akan dise-

1 Ki Hadjar Dewantara, *Dari Kebangunan Nasional sampai Proklamasi Kemerdekaan Djakarta 1952*, hal. 97—104.

2 W.S.T. Pondaag, *Pahlawan Kemerdekaan Nasional Mahaputra Dr. G.S.S.J. Ratulangi*, Surabaya 1966

3 *Indonesia Merdeka*. 5e jrg., no. 1—2 (Maart—April) 1927, hal. 52

barluaskan melalui majalah *De Stuw* (Pendorong). Tetapi dalam masa Gubernur Jendral De Jonge, majalah dan kelompok yang menerbitkan *De Stuw* mengundurkan diri dengan sukarela dari panggung sejarah. Alasannya antara lain untuk tidak membahayakan masa depan para penyumbang karangan yang masih muda dan belum mempunyai kedudukan pasti di dalam masyarakat. Prof. Resink, kini menjadi profesor riset pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mengungkapkan, bahwa adanya perbedaan marginal dari satu huruf saja antara istilah ilmu pengetahuan "Indonesië" dan istilah politik "Indonesia" dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan pada waktu itu.¹

Meskipun demikian usaha-usaha pemakaian kata Indonesia dalam arti politik-ketatanegaraan berjalan terus. Di dalam *Volksraad*, seperti telah disebutkan di muka, Thamrin dengan Fraksi Nasional mengumumkan akan mempergunakan Bahasa Indonesia dalam sidang-sidang. Maksud Fraksi Nasional itu mendapat perhatian *Raad van Indië* (Dewan Penasihat Gubernur Jendral), yang dalam suratnya tertanggal 1 Juli 1938 kepada Gubernur Jendral memperingatkan, bahwa maksud Thamrin akan menimbulkan kesulitan-kesulitan politik yang dapat menjurus ke arah keadaan gawat. Penggunaan Bahasa Indonesia (dalam teks surat masih disebut *het Maleisch*), karena sifatnya (menurut *Raad van Indië*) akan mempunyai arti propaganda bagi pergerakan nasional dan hal itu akan merupakan langkah pertama ke arah penggunaan bahasa itu secara luas di dalam *Volksraad*. Pidato-pidato yang diucapkan dalam Bahasa Indonesia secara harafiah akan mendapat tempat di dalam pers Indonesia. Sulitlah bagi Ketua *Volksraad* untuk mengontrol pernyataan-pernyataan dan pandangan-pandangan politik yang tidak disukai di dalam pidato-pidato *Volksraad*.²

Dari usul penggunaan Bahasa Indonesia, ternyata anggauta-anggauta Indonesia dalam *Volksraad* mengaitkan diri dengan

¹ G.J. Resink, *Indonesia's History Between the Myths. Essays in Legal History and Historical Theory*, The Hague 1968. hal. 17. Mengenai kelompok *De Stuw* lihat karangan E.B. Locher-Scholten, "De Stuw, tijdstekening en teken des tijds". *Tijdschrift voor Geschiedenis*, 84e jrg., Afl. 3. 1971, hal. 36 dan seterusnya

² lihat catatan (2) hal. 778

keputusan-keputusan Kongres Bahasa di Surakarta yang telah diadakan pada tanggal 1 Juni 1938.

Dari usul penggunaan Bahasa Indonesia, anggauta-anggauta Indonesia di dalam *Voksraad* meningkatkan perjuangannya ke dalam mosi-mosi ketatanegaraan, yang terkenal sebagai mosi-Wiwoho, mosi-Sutardjo dan mosi-Thamrin. Ketiga mosi itu berturut-turut ikut ditanda-tangani oleh Sukawati dan Kasimo, Sukawati-Thamrin dan Mulia, dan yang ketiga oleh Sutardjo dan Sukawati. Pada pokoknya di dalam ketiga mosi itu tercantum usul perlunya perubahan ketata negaraan dan kewarganegaraan Hindia (*Indisch Burgerschap*). Di dalam mosi-Thamrin jelas dicantumkan agar kata-kata *Nederlandsch-Indië* dan *Inlander* dihapuskan dari semua peraturan-peraturan dan undang-undang dan lain sebagainya dan diganti dengan *Indonesia*, *Indonesiër* dan *Indonesisch*. Itu terjadi pada tahun 1940.

Sudah barang tentu pemerintah Hindia Belanda menolak mosi-mosi tersebut, bahkan menutup kemungkinan pertukaran pikiran lebih lanjut di dalam *Volksraad* bila usaha-usaha perubahan di dalam mosi dimaksudkan untuk mencapai kemerdekaan politik. Dalam pada itu perang melanda Eropa, disusul dengan Perang Pasifik. Baru setelah meletusnya Revolusi Indonesia pada tahun 1945, istilah Indonesia resmi mendapat arti politik-ketatanegaraan, baik secara nasional maupun internasional, dan itu merupakan hasil perjuangan pergerakan kemerdekaan.

PENUTUP

Dari uraian tersebut di atas, meskipun berupa sebuah ikhtisar kerangka perkembangan, kedudukan peristiwa sejarah pada bulan Oktober 1928 jelas merupakan mata-rantai yang menyambungkan masa lampau dan harapan-harapan masa depan. Dari pemakai Bahasa Melayu, yang semula terbatas pada suku-bangsa, lambat laun menjadi bahasa golongan masyarakat yang silih berganti muncul dan berkembang sepanjang sejarah Indonesia.

Dari bahasa pergaulan kemudian menjadi bahasa untuk menyebarkan agama, bahasa untuk perdagangan, bahasa perjanjian dagang dan politik, bahasa pers, bahasa dalam kesusteraan. Kemudian golongan pemuda terpelajar menetapkan sebagai bahasa pembinaan nasion, yang disambungkan dengan nama Indonesia.

Apa artinya usaha-usaha itu dalam keadaan hubungan kolonial, di dalam wilayah yang begitu luas sungguh tak terikrakan. Belum lagi bila dilihat dari jumlah pulau-pulau dan daerah-daerahnya yang dipisahkan oleh hutan-hutan, gunung-gunung dan lautan, sehingga kurang lebih 250 dialek terdapat di negeri kita.

Dokumen-dokumen yang mengawetkan usaha-usaha tersebut kini perlulah digali, dan kalau perlu diterbitkan kembali, sehingga dapat tersebar dan dipergunakan oleh kalangan yang lebih luas. Suatu pembacaan yang dilakukan sekarang dapat memperoleh pengetahuan tentang gaya, isi, motivasi, lingkungan sosial serta pengaruh kekuatan-kekuatan sosial lain yang tumbuh pada awal abad ke-XX di Indonesia.

Secara keseluruhan dapatlah diperoleh data yang bertalian dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Dari suatu kerangka perkembangan tersebut di atas, yang masih perlu dianyam dengan data yang berasal dari para pelaku dan saksi peristiwa sejarah, sudah dapat ditarik kesimpulan: Sejarah perjuangan Bahasa Indonesia dan Nama Indonesia merupakan salah satu saluran perkembangan nasional, terutama dalam usaha pembinaan nasion Indonesia.¹

1 Berbagai segi lain dalam proses itu telah dijadikan pokok-pokok disertasi Dr. Harsja W. Bachtiar, *The Formation of the Indonesian Nation*, Harvard University, Cambridge-Massachusetts 1972. Dalam bentuk naskah disertasi itu dapat dibaca pada Perpustakaan Museum Pusat di Jakarta. Harsja W. Bachtiar memperhatikan kedudukan dan peranan pranata sosial, terutama pranata pendidikan jaman Hindia Belanda dalam proses *pembentukan bangsa* (nation formation). Karangan saya di atas adalah suatu tinjauan perkembangan sejarah dilihat dari proses bertumbuhnya gagasan dan kegiatan ke arah *pembinaan bangsa* (nation building).

CATATAN TAMBAHAN

Karangan di atas disiapkan lima tahun yang lalu dan merupakan bagian dari suatu kerangka teoretis untuk penulisan yang mencakup tema komunikasi sosial dan pendidikan pada awal abad ke-XX (1900-1945). Sasaran pokok telaah mencakup tiga segi perkembangan masyarakat melalui jalur pendidikan,¹ bahasa dan pers Indonesia² dalam proses menuju integrasi nasional. Ketiga jalur perkembangan itu, di samping jalur-jalur yang lain, berada di tengah-tengah suasana keadaan gerakan pembaruan masyarakat budaya, dari suasana keadaan masyarakat kolonial menuju masyarakat merdeka.

Setelah karangan di atas selesai telah timbul berbagai telaah mengenai soal-soal yang bersangkut-paut dengan tema tersebut di atas³ atau data baru yang diungkapkan oleh para pelaku sejarah,⁴ yang lima tahun yang lalu tidak diketahui penulis karangan ini. Demikianlah tidak disinggung dalam karangan ini kedudukan dan peranan pers pemuda (waktu itu disebut *jeugd pers*), perbincangan gagasan kesatuan dan persatuan bangsa dalam Kongres Pemuda Ke-I (1926), pengaruh organisasi

1 Abdurrachman Surjomihardjo, "Cita-cita Demokrasi Dalam Pendidikan Bangsa: Sebuah Tinjauan Historis," *Prisma*, no. 2, Februari 1977, hal. 76-84

2 Abdurrachman Surjomihardjo, *The Indonesian Press 1900-1942*, kertas kerja untuk Kongres ke-VI Perhimpunan Sejarawan Asia, Yogyakarta 1974

3 A.I. mengenai asal usul dan pemakaian kata Indonesia, Russel Jones, Earl, Logan and Indonesia, *Archipel*, 6, 1973, hal 93-118. Akira Nagazumi, "Indonesia" dan "Orang-orang Indonesia". Semantik dalam Politik, dalam S. Ichimura dan Koen-tjaraningrat (redaksi), *Indonesia. Masalah dan Peristiwa. Bunga Rampai*, P.T. Gramedia, Jakarta 1976, hal 1-25. Karangan itu semula dimuat dalam *Asian Profile*, August 1973, hal 91-102

Tentang perkembangan gagasan kesadaran nasional di antara para pelajar Indonesia di Nederland lihat Harsja W. Bachtiar, "The Development of Common National Consciousness Among Students from the Indonesian Archipelago in the Netherlands," *Majalah Ilmu-ilmu Sastra Indonesia*, Mai 1976, Jilid VI, No. 2, hal. 31-44. Leo Suryadinata, "Indonesia Natioanalism and Pre-war Youth Movement. A. Reexamination," *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. IX, No. 1, March 1978, hal 99-114. Karangan Suryadinata terutama berdasar sumber-sumber sekunder, sehingga terdapat beberapa kekeliruan detail, namun sebagai kerangka perkembangan gerakan pemuda antara konsensus dan konflik sangat menarik untuk diperhatikan.

4 Periksa karangan-karangan para pelaku sejarah dalam *45 Tahun Sumpah Pemuda*, Yayasan Gedung-gedung Bersejarah Jakarta, 1978

Jong Indonesië, kemudian menjadi *Pemuda Indonesia*, dan *Perhimpunan Pelajar-pejajar Indonesia* (PPPI), yang mendorong Kongres Pemuda Ke-II (1928). Segi-segi terakhir ini telah dimuat dalam karangan saya (secara garis besar) dalam surat kabar *Kompas*, 24 Oktober 1978 (hal. IV dst.), berjudul "Ikrar, Putusan dan Sumpah Pemuda".

Satu hal perlu dilengkapkan di sini, yaitu mengenai pemakaian istilah "Sumpah Pemuda", ternyata sebelum Takdir Ali-sjahbana (lihat catatan hal. 777) istilah itu telah dipakai oleh Jusupadi (Danuhadiningrat) sebagai penulis I Komisi Besar Indonesia Muda, yang telah membacakan Berita Komisi Besar dalam "kerapatan besar" Indonesia Muda pada tanggal 31 Desember 1930 di Surakarta sbb.: "Tanggal 29 Oktober bolehlah kita berkata:

Dari Djakarta,

Moelailah kemenangan kita

Boekankah diitoe hari lahir lagoe Indonesia Raja, lagoe yang kita akoei sebagai lagoe kebangsaan?

Boekankah diitoe hari kita poetri dan poetra Indonesia bersoempah:"¹.

Dari data itu maka pemakaian istilah sumpah telah menjadi pembicaraan para pemuda yang duduk dalam Komisi Besar Pemuda Indonesia, yang bertekad untuk melaksanakan peleburan organisasinya dalam satu wadah kesatuan dan persatuan menjelang Kerapatan Besar Pemuda tersebut di atas.

Mengenai berbagai segi sebelum dan sesudah Kongres Pemuda Ke-II, suatu *Bunga Rampai Soempah Pemoeda 50 Tahun* telah pula diterbitkan oleh Yayasan Gedung-gedung Bersejarah Jakarta (Dicetak dan diedarkan oleh PN Balai Pustaka, Jakarta 1978).

¹ *Kerapatan Besar Pemoeda Indonesia yang ke-I, 29 Desember 1930-2 Januari 1931 di Soerakarta*, hal. 56

MENGGALANG PERSATUAN BANGSA INDONESIA

Kirdi DIPOYUDO

Sumpah Pemuda *satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa*, hasil Kongres Pemuda Indonesia ke-II tanggal 27-28 Oktober 1928, biarpun pada waktu itu lebih merupakan cita-cita daripada kenyataan, adalah sangat penting bagi pergerakan nasional Indonesia karena dapat dipandang sebagai lahirnya bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia (lihat lampiran). Sumpah itu adalah suatu semboyan yang mengobarkan semangat kebangsaan dan sekaligus suatu program kerja untuk mewujudkan Indonesia Merdeka yang dicita-citakan. Dengan maksud itu akan ditingkatkan usaha untuk menggalang persatuan dan kesatuan seluruh penduduk Nusantara. Di antara mereka akan ditanamkan dan dibina kesadaran nasional yang kuat.

Akan tetapi perjuangan itu tidaklah mudah. Pada tahun 1920-an ketika pemimpin-pemimpin pergerakan nasional Indonesia mulai menuntut kemerdekaan, mereka berbicara tentang bangsa Indonesia yang telah bertekad untuk membebaskan diri dari dominasi kolonial. Namun kenyataannya adalah berlainan. Penduduk Indonesia yang mereka wakili terdiri atas berbagai kelompok etnis yang masing-masing dapat disebut bangsa. Kelompok-kelompok itu belum merupakan suatu kesatuan yang bulat. Adalah sangat sulit untuk menemukan apa yang lazim dipandang sebagai model suatu bangsa seperti dibatasi oleh

Rupert Emerson: "Model ideal bangsa adalah satu rakyat yang secara tradisionil menetap di wilayah tertentu yang jelas batas-batasnya, memakai bahasa yang sama dan seyogyanya bahasa mereka sendiri, memiliki suatu kebudayaan sendiri, dan mendapatkan suatu bentuk bersama berkat banyak generasi pengalaman sejarah bersama." ¹

Pada waktu itu penduduk Indonesia belum merupakan suatu bangsa serupa itu, tetapi terdiri atas kelompok-kelompok etnis yang masing-masing memiliki ciri-ciri itu dan oleh sebab itu dapat dipandang sebagai bangsa. Orang-orang Jawa misalnya merupakan satu bangsa, yang mempunyai ciri-ciri rasial, sejak dahulu menetap di Jawa Tengah dan Jawa Timur, memakai bahasa mereka sendiri, mempunyai kebudayaan mereka sendiri dan mendapatkan suatu bentuk bersama berkat banyak generasi pengalaman sejarah bersama. Hal yang sama berlaku bagi orang-orang Minangkabau, Bali, Bugis, Sunda, Melayu dan lain-lain. Masing-masing kelompok itu mempunyai bahasanya sendiri, wilayahnya sendiri, nilai-nilai dan norma-norma atau adat istiadatnya sendiri, susunan politiknya sendiri, arsitekturnya sendiri, tari-tarian dan lagu-lagunya sendiri, filsafat dan literaturnya sendiri, dan biasanya juga agamanya sendiri. Dengan perkataan lain masing-masing kelompok itu adalah suatu bangsa tersendiri, sehingga penduduk Indonesia terdiri atas berbagai bangsa. ²

Hal itu sesuai dengan pengertian Ernest Renan yang banyak dikutip: "Suatu bangsa ialah jiwa, suatu asas rohani. Dua hal yang sesungguhnya hanya berwujud satu (yang) membentuk jiwa (atau) asas rohani itu. Yang satu terdapat dalam waktu yang telah silam, yang lain dalam waktu sekarang. Yang satu yakni memiliki bersama warisan kenang-kenangan yang kaya raya; yang lain ialah persetujuan sekarang, *keinginan untuk hidup bersama*, kehendak untuk terus mempergunakan warisan yang

1. Disalin dari Rupert Emerson, *From Empire to Nation: The Rise to Self-Assertion of Asian and African Peoples* (Boston, 1962), hal. 103
2. Lihat Harsja W. Bachtiar, *The Indonesian Nation. Some Problems of Integration and Disintegration* (Singapura, 1974), hal. 19-20

ANALISA

diterima secara tidak terbagi itu.”¹ Dengan perkataan lain, suatu bangsa dihimpun oleh suatu warisan budaya bersama dan citra-citra yang berakar pada ingatan para warganya. Bangsa itu juga dihimpun oleh suatu tekad bulat para warganya untuk hidup bersama sebagai satu masyarakat.

Komposisi penduduk Indonesia dan kekuatan masing-masing kelompok komponennya dapat dilihat pada tabel berikut:

SUKU SUKU BANGSA INDONESIA

No.	Suku bangsa	1930	1971
1.	Jawa	27.808.623	54.750.710
2.	Sunda	8.594.834	17.232.180
3.	Madura	4.305.862	8.532.977
4.	Minangkabau	1.988.648	3.897.130
5.	Bugis	1.533.035	3.073.625
6.	Batak	1.207.514	2.420.420
7.	Bali	1.111.659	2.228.789
8.	Jakarta	980.863	1.866.575
9.	Melayu	953.397	1.811.525
10.	Banjar	898.884	1.702.192
11.	Aceh	831.321	1.666.750
12.	Palembang	770.917	1.545.647
13.	Sasak	659.477	1.322.211
14.	Dayak	651.720	1.208.608
15.	Makassar	642.720	1.208.608
16.	Toraja	557.590	1.117.944
17.	Manado	281.599	564.587
18.	Lain-lain	5.542.332	10.111.960
Jumlah		59.138.067	116.429.831

Catatan: Angka-angka untuk tahun 1930 adalah hasil sensus 1930, tetapi sejak Proklamasi Kemerdekaan sensus-sensus tidak mengumpulkan angka-angka untuk suku bangsa masing-masing. Namun dengan asumsi bahwa laju pertumbuhannya sama — kenyataannya laju pertumbuhan itu tidak sama — dapat diadakan suatu perhitungan untuk mendapatkan angka-angka kasar

¹ Dikutip dari Ernest Renan, *Apakah Bangsa itu?* (Jakarta, 1968), hal. 35. Salinan Prof. Sunario dari pidatonya di Universitas Sorbonne 11 Maret 1882 yang berjudul *Qu'est ce qu'une nation?*

mengenai besarnya suku bangsa masing-masing. Angka-angka untuk tahun 1971 itu adalah hasil perhitungan yang didasarkan atas hasil sensus 1930 dan atas asumsi bahwa jumlah penduduk Indonesia tahun 1971 itu adalah sekitar 116,5 juta.¹

Dalam perjuangan untuk mencapai Indonesia Merdeka, yang akan meliputi seluruh kepulauan Indonesia dan segenap penduduknya, salah satu tugas pokok yang dihadapi pemimpin-pemimpin pergerakan nasional Indonesia ialah menggalang persatuan sekian banyak bangsa itu menjadi satu bangsa. Dalam hal ini mereka mengalami banyak kesulitan, khususnya karena pemerintah kolonial, untuk mempertahankan kekuasaannya, menjalankan politik "divide et impera", politik memecah belah, antara lain dengan mengutamakan bangsa yang satu atas bangsa yang lain, menimbulkan dan membina semangat kecurigaan dan pertentangan antar bangsa.

Pada bangsa-bangsa itu perlu ditanamkan dan dikembangkan kesadaran bahwa mereka merupakan satu bangsa atau kesadaran nasional. Dalam rangka itu didirikan perkumpulan-perkumpulan sebagai pusat-pusat untuk membina dan memperluas kesadaran nasional. Secara demikian muncullah Budi Utomo, Serikat Islam, Indische Partij, Partai Komunis Indonesia, Perhimpunan Indonesia, Studie Club, Partai Nasional Indonesia, Parindra dan lain sebagainya. Mula-mula pergerakan itu terutama bermaksud memajukan kehidupan kebangsaan, memperbaiki tingkat hidup rakyat, memajukan pendidikan dan kebudayaan. Akan tetapi semuanya itu mau tak mau menjurus ke nasionalisme Indonesia, yang menuju eksistensi politik tersendiri dengan hak untuk menentukan dan mengatur nasib sendiri seluas-luasnya.² Nasionalisme tidak puas dengan pemerintahan sendiri yang parsial, tetapi selalu memperjuangkan pemerintahan sendiri yang lengkap. Aspirasi pertama nasionalisme adalah perjuangan untuk mewujudkan persatuan nasional dalam bidang politik atau negara nasional.

1 Lihat *Volkstelling 1930* (Batavia, 1933-1936); lihat juga Harsja W. Bachtiar, *op. cit.*, hal. 12

2 Mengenai pergerakan nasional Indonesia lihat buku A.K. Pringgodigdo, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia* (Jakarta, 1970⁷)

Faktor-faktor yang menunjang pergerakan nasional antara lain ialah kesatuan bahasa, agama, kebudayaan dan wilayah. Di samping faktor-faktor obyektif itu terdapat juga faktor-faktor subyektif seperti kesukaran-kesukaran bersama, penderitaan bersama, pengorbanan bersama dan adanya pahlawan-pahlawan bangsa yang melawan dominasi asing. Semuanya itu bisa menimbulkan kesadaran senasib, se-kepentingan dan sepenanggungan, yang lambat laun berkembang menjadi kesadaran nasional, menjadi nasionalisme. Nasionalisme ini pada gilirannya adalah suatu gerakan sosial, suatu aliran rohani yang menghimpun orang-orang menjadi satu bangsa, yang membangkitkan massa ke dalam keadaan sosial dan politik yang aktif.¹

Nasionalisme sebagai ungkapan kesadaran nasional mengandung cita-cita yang merupakan inspirasi yang merangsang dan mendorong suatu bangsa ke arah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan sepenuhnya, untuk menjadi negara nasional. Dalam proses itu dapat kita bedakan berbagai tahap perjuangan: (1) perjuangan untuk mewujudkan persatuan nasional yang mencakup persatuan politik, ekonomi, sosial serta budaya dan adanya solidaritas; (2) perjuangan untuk mewujudkan kemerdekaan nasional yang mencakup kebebasan dari dominasi asing dan kebebasan dari kekuatan-kekuatan intern yang tidak bersifat nasional seperti kesukuan, kedaerahan dan sebagainya; (3) perjuangan untuk mewujudkan kepribadian, keaslian dan kekhususan yang membedakan suatu bangsa dari bangsa-bangsa lain; dan (4) perjuangan untuk mewujudkan pembedaan di antara bangsa-bangsa yang mencakup perjuangan untuk mendapatkan kehormatan, kewibawaan, gengsi dan pengaruh.²

Dalam pergerakan nasional Indonesia kombinasi faktor-faktor obyektif dan subyektif itu berhasil menimbulkan kesadaran nasional yang semakin meluas dan semakin kuat di antara penduduk Indonesia. Dari pemimpin-pemimpin pergerakan dia lambat laun merembes ke lingkungan yang lebih luas di seluruh Nusantara. Secara demikian timbulah keinginan dan perjuang-

1 Lihat F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik* (Bandung, 1967), hal. 108-115

2 *Ibid.*

an rakyat Indonesia untuk hidup sebagai satu bangsa, mengembangkan satu kebudayaan, memperbaiki nasib dan akhirnya untuk membentuk satu negara nasional yang meliputi seluruh kepulauan Indonesia dan semua kelompok etnis yang sebelumnya merupakan bangsa-bangsa sendiri.¹

Dalam proses itu Sumpah Pemuda telah memegang peranan penting dan menjadi salah satu tonggak sejarah pergerakan nasional Indonesia. Di satu pihak peristiwa itu mengungkapkan suatu tekad untuk menghimpun semua kelompok etnis menjadi satu bangsa, dan di lain pihak menjadi dorongan yang kuat untuk meningkatkan perjuangan guna mencapai persatuan dan kesatuan nasional sebagai syarat mutlak bagi pembentukan Indonesia Merdeka. Secara demikian kesadaran nasional yang telah tumbuh dan merata menjadi semakin tebal dan meluas di kalangan penduduk yang tersebar di seluruh kepulauan. Dengan perkataan lain, Sumpah Pemuda tahun 1928 itu ternyata menjelaskan ungkapan nasionalisme dan sekaligus bahan bakar yang akan semakin mengobarkannya. Dalam semangat itu kesukaran-kesukaran yang timbul akibat perbedaan pandangan dan kepentingan antara kelompok-kelompok dan golongan-golongan lambat laun dapat diatasi, sehingga cita-cita "satu bangsa" makin lama makin kuat dan menjadi kenyataan yang makin besar.²

Khususnya pernyataan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan Indonesia memainkan peranan penting dalam kebangkitan dan perkembangan nasional itu. Berkat pernyataan itu Indonesia tidak mengenal masalah bahasa nasional yang parah seperti berbagai negara lain biarpun terdapat sekian banyak suku bangsa dan bahasa. Masalah yang dihadapi oleh Indonesia sekitar bahasa nasional tidak menimbulkan perpecahan dan bentrokan-bentrokan berdarah yang misalnya terjadi di India.

1 Lihat antara lain pidato Muhammad Yamin "Kebangunan (Renaissance) Bangsa Indonesia", dalam *Kerapatan Besar Indonesia Muda yang ke-I*, 29 Desember 1930 - 2 Januari 1931 (1931)

2 Mengenai arti Sumpah Pemuda bagi pergerakan nasional Indonesia antara lain lihat Prof. Sunario, "Arti Sumpah Pemuda, Nasional dan Internasional", dalam *45 Tahun Sumpah Pemuda* (Jakarta, 1974), hal. 277-289; dan karangan Abdurrahman Surjomihardjo, "Sumpah Pemuda di dalam Perkembangan Budaya-Politik Indonesia 1900-1945", *ibid.*, hal. 291-304

Masalah bahasa persatuan yang juga timbul dalam pergerakan nasional Indonesia dapat diselesaikan dengan baik dalam waktu yang cukup singkat. Masalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Di antara sekian banyak bahasa itu manakah yang akan dijadikan bahasa nasional? Beberapa bahasa seperti di Swiss atau satu saja seperti di kebanyakan negara? Para pemimpin nasionalis menyadari bahwa dalam kehidupan bangsa dan negara kesatuan bahasa atau bahasa persatuan adalah sangat penting. Mereka menyadari bahwa bahasa persatuan dapat menunjang usaha mempersatukan seluruh penduduk Indonesia dan membina persatuan itu. Sesuai dengan itu mereka akhirnya sepakat untuk menerima satu bahasa nasional dan dengan maksud itu memilih bahasa Melayu: "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia". Sejak itu bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan dan disebut bahasa Indonesia.¹

Bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa persatuan Indonesia karena berbagai alasan. Pertama, bahasa Melayu telah lama digunakan sebagai lingua franca atau bahasa komunikasi penduduk Indonesia, baik antara mereka maupun dengan orang-orang asing. Dia bahkan telah berkali-kali menjadi bahasa kebudayaan dan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan agama-agama yang memasuki Indonesia. Jan Huyghen van Linschoten (1563-1611) seorang penulis Belanda dalam kisah perjalanannya antara lain menulis: "Ketika kota itu (Malaka), berkat letaknya yang baik, telah menjadi pelabuhan yang terpenting di Asia Tenggara, bahasanya yang disebut bahasa Melayu dipandang sebagai bahasa pergaulan yang sopan dan bahasa yang paling cocok di antara semua bahasa di Timur Jauh." Kedua, bahasa Melayu adalah lebih sesuai dengan jiwa kebangkitan baru, jiwa persatuan yang demokratis, daripada bahasa Jawa. Lagi pula susunan kata-kata dan kalimatnya sederhana dan tepat, sehingga mudah digunakan sebagai bahasa pergaulan. Ketiga, usaha-usaha yang dilakukan dalam pergerakan nasional itu untuk menyesuaikan bahasa Jawa dengan tuntutan jaman, khususnya dalam

¹ Lihat karya Zuber Usman, *Bahasa Persatuan* (Jakarta, 1970), hal. 97; lihat juga Umar Junus, *Sejarah dan Perkembangan ke arah Bahasa Indonesia* (Jakarta, 1969), khususnya hal. 24-39

bentuk demokratisasi, tidak berhasil. Bahasa Jawa dalam keadaannya waktu itu tidak sesuai dengan tujuan dan haluan perkumpulan yang memperjuangkan penghimpunan semua golongan dalam satu bangsa, lagi pula kurang selaras dengan jiwa demokrasi. Pemimpin-pemimpin nasional dari suku Jawa menginsyafi kelemahan-kelemahan itu dan dengan rela melepaskan bahasa mereka dari kesempatan untuk menjadi bahasa persatuan Indonesia. Untuk membina jiwa persatuan yang lebih luas dan membina semangat demokrasi, maka bahasa Jawa dilepaskan dan sebagai gantinya dipilih bahasa Melayu.¹

Sejak Sumpah Pemuda itu bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa nasional Indonesia, antara lain dalam penerbitan-penerbitan, dalam pers, dalam perkumpulan-perkumpulan, dalam perdagangan, di kantor-kantor dan sekolah-sekolah serta dalam pergauluan antar suku sehari-hari. Pendudukan Jepang tahun 1942-1945 ikut mempercepat proses itu. Karena keberatan politis bahasa Belanda yang merupakan bahasa resmi pemerintahan kolonial Belanda tidak boleh dipakai lagi dan sebagai gantinya digunakan bahasa Indonesia, terutama dalam penerbitan dan pers, pada instansi-instansi pemerintah dan di sekolah-sekolah. Dengan demikian dalam sidang-sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia juga digunakan bahasa Indonesia.²

Menjelang akhir Perang Dunia ke-II kesadaran nasional dan nasionalisme Indonesia itu telah mencapai puncaknya. Para pemimpin bangsa menyiapkan proklamasi kemerdekaan dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk membentuk negara nasional, antara lain menyusun rancangan UUD dan rancangan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang harus diambil oleh Pemerintah Indonesia Merdeka. Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa para pemimpin yang duduk dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang menyusun rancangan-rancangan itu dan dalam Panitia Persiapan Kemer-

1 Mengenai alasan-alasan mengapa pemimpin-pemimpin pergerakan nasional Indonesia memilih bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan Indonesia lihat Zuber Usman, *op. cit.* hal. 23-30 dan 64-68; lihat juga Zuber Usman, *Bahasa Melayu sebelum dan sesudah menjadi Lingua Franca* (Jakarta, 1977)

2 Lihat Umar Junus. *op. cit.*, hal. 39-68

dekaan Indonesia yang mengesahkannya menjadi UUD berasal dari berbagai kelompok etnis dan dianggap sebagai mewakili seluruh rakyat Indonesia. Dengan pertimbangan-pertimbangan geografis, etnis dan historis mereka memutuskan bahwa wilayah Indonesia Merdeka adalah seluruh kepulauan Nusantara dan rakyatnya seluruh penduduk Nusantara.¹

Sebagai puncak pergerakan nasional itu, pada 17 Agustus 1945 terjadi Proklamasi Kemerdekaan dan lahirlah Negara Indonesia sebagai negara nasional yang meliputi seluruh Nusantara dan penduduknya. Sehari kemudian Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengesahkan Rancangan UUD tersebut menjadi UUD. Seperti ditetapkan dalam Pembukaan UUD itu, Indonesia Merdeka dibangun atas dasar Pancasila, yaitu pandangan hidup bangsa Indonesia yang dipadatkan dan dimurnikan menjadi dasar falsafah negara modern. Salah satu dari kelima sila Pancasila ialah persatuan atau kebangsaan Indonesia, yang mencerminkan susunan negara nasional yang bercorak bhinneka tunggal ika, satu negara bangsa yang terdiri atas berbagai suku. Berkat perjuangan kaum nasionalis Indonesia, bangsa-bangsa yang mendiami Nusantara secara berangsur-angsur bersatu menjadi satu bangsa dan satu negara. Sebagai akibatnya bangsa-bangsa itu kehilangan kedudukan mereka sebagai bangsa dan menjadi suku-suku bangsa.

Dengan proklamasi kemerdekaan itu perjuangan nasional mencapai puncaknya, tetapi belum selesai. Penduduk Indonesia telah menjadi satu bangsa yang sadar akan diri serta kesatuan dan berhasil membentuk negara nasional Persatuan dan kesatuan berbagai suku dan golongan telah menjadi kenyataan, tetapi belum sempurna dan masih harus dibina terus menerus agar menjadi semakin kokoh. Kesadaran nasional harus dikembangkan dan ditingkatkan lebih lanjut tetapi juga harus dimurnikan. Tendensi-tendensi untuk mengutamakan suku dan daerah di atas bangsa tidak lenyap begitu saja dengan Proklamasi

¹ Lihat Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945*, I (Jakarta, 1971), hal. 143-437; lihat juga Mohamad Hatta, *Sekitar Proklamasi* (Jakarta, 1970)

Kemerdekaan. Lagi pula keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah tidak mudah diketemukan dan tidak mudah dilaksanakan, baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh daerah yang bersangkutan. Karya nation-building harus diteruskan dengan meningkatkan persatuan dan memajukan kerukunan, kerjasama, integrasi dan asimilasi antar suku dan antar golongan, tetapi perbedaan-perbedaan dan ciri-ciri daerah serta kelompok yang sah tidak boleh dihapus.

Selama 33 tahun sebagai negara merdeka, Indonesia mengalami banyak kesulitan dalam hal itu. Di berbagai daerah muncul gerakan-gerakan separatis yang kadang-kadang disertai kekerasan senjata, yang membahayakan persatuan bangsa dan negara, lagi pula menghambat pembangunan nasional yang harus dilakukan untuk memperbaiki nasib rakyat banyak. Akan tetapi berkat kebijaksanaan Pemerintah dan ketegasan ABRI serta dukungan rakyat bagi Pemerintah, gerakan-gerakan yang membahayakan eksistensi negara itu dapat diatasi dengan baik. Negara berhasil mempertahankan kesatuan rakyat dan wilayahnya serta menegakkan kedaulatannya di seluruh Nusantara.¹

Namun kita harus tetap waspada terhadap bahaya-bahaya yang dapat mengancam kesatuan nasional kita. Kepada seluruh rakyat diminta agar menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan perpecahan dan keretakan persatuan itu, lagi pula memajukan hal-hal yang dapat membina dan mengembangkannya. Seluruh rakyat harus selalu menyadari bahwa makin kuat persatuan nasional kita makin besar pula kemampuan negara kita untuk menjalankan tugasnya demi tercapainya tujuan-tujuan nasional "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".²

1 Lihat Harsja W. Bachtiar, *op. cit.*, khususnya hal. 28-32

2 Pembukaan UUD 1945

Dalam rangka itu negara wajib mencegah atau mengatasi perpecahan dan pertentangan antara sesama golongan dan antara sesama warganegara, lagi pula mempertebal persatuan nasional. Sehubungan dengan itu apa yang telah dirumuskan dalam GBHN 1978 mengenai "Wawasan Nusantara" harus dilaksanakan secara konsekuensi dan konsisten.¹ Indonesia telah merupakan suatu kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial dan budaya, kesatuan bangsa, kesatuan ekonomi dan kesatuan pertahanan-keamanan. Akan tetapi kesatuan multi dimensi itu harus dibina dan ditingkatkan secara terus menerus, agar menjadi semakin kokoh dan semakin operasional. Persatuan nasional adalah syarat mutlak bagi kelangsungan negara dan sukses perjuangannya untuk mewujudkan cita-cita nasional.

Persatuan nasional Indonesia telah menghasilkan satu bangsa dan satu negara nasional. Adanya negara nasional selanjutnya menuntut adanya kesatuan intern dan kemerdekaan terhadap negara-negara lain, tetapi tidak secara mutlak. Kesatuan intern yang mutlak, yang tidak mengakui perbedaan apapun, adalah paksaan yang menindas kemerdekaan perorangan dan otonomi yang sah dari golongan-golongan serta kelompok-kelompok, sedangkan kemerdekaan mutlak yang tidak peduli akan negara-negara lain menjurus kepada imperialisme. Kebangsaan Indonesia menolak kedua sikap ekstrim itu dengan mengakui adanya perbedaan-perbedaan ke dalam dan menghormati hak-hak bangsa-bangsa lain. Kebangsaan Indonesia menempuh jalan tengah. Ke dalam dia menolak kesatuan mutlak maupun separatisme dan pertentangan-pertentangan antar suku dan antar golongan. Ke luar dia menolak baik isolasionalisme maupun imperialisme, ekspansionisme dan kosmopolitanisme yang tidak menghargai nilai-nilai nasional. Sebaliknya persatuan nasional Indonesia ke dalam mewajibkan negara untuk membiarkan otonomi daerah-daerah, mengakui dan menghormati hak-hak minoritas-minoritas, menghormati adat istiadat yang beraneka ragam, bahasa-bahasa dan kebudayaan-kebudayaan daerah, menghormati agama-agama dan menerima paling tidak dua partai politik. Keluar dia mewajibkan negara untuk menjalin

¹ Lihat TAP IV/MPR/1978

hubungan baik dan bekerjasama dengan negara-negara lain atas dasar kemerdekaan, persamaan, saling menguntungkan dan saling menghormati dan keadilan sosial antar bangsa.¹

Dalam rangka itu bangsa Indonesia telah memiliki banyak hal yang sangat menguntungkan, khususnya Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan pandangan hidup serta moral bangsa, UUD 1945, satu bahasa nasional untuk seluruh wilayah negara, satu bendera, satu lagu kebangsaan, satu pemerintah dan satu angkatan bersenjata. Proses integrasi bangsa lewat asimilasi warganegara keturunan asing dan perkawinan antar suku dan antar golongan yang semakin banyak terjadi juga merupakan faktor-faktor yang positif. Semuanya itu harus dimanfaatkan sepenuhnya. Demikianpun harus digalakkan usaha-usaha untuk membentuk dan mengembangkan kebudayaan nasional serta pendidikan nasional, yang memegang peranan yang sangat penting dalam memelihara dan meningkatkan persatuan nasional.

¹ Lihat Rahmat Subagya, *Pancasila Dasar Negara Indonesia* (Yogyakarta, 1954), hal. 76-80

ANALISA

Lampiran

”PUTUSAN KONGRES PEMUDA-PEMUDI INDONESIA

Kerapatan pemuda-pemuda Indonesia diadakan oleh perkumpulan-perkumpulan Indonesia yang berdasarkan kebangsaan, dengan namanya *Jong Java*, *Jong Sumatra* (Pemuda Sumatra), Pemuda Indonesia, Sekar Rukun, *Jong Islamieten Bond*, *Jong Celebes*, Pemuda Kaum Betawi dan Perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia;

Membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di negeri Jakarta; Sesudahnya mendengar pidato-pidato pembicaraan yang diadakan di dalam kerapatan tadi;

Sesudah menimbang segala isi-isi pidato-pidato dan pembicaraan ini;

Kerapatan lalu mengambil keputusan:

Pertama : KAMI PUTRA DAN PUTRI INDONESIA MENGAKU BERTUMPAH DARAH YANG SATU, TANAH INDONESIA.

Kedua : KAMI PUTRA DAN PUTRI INDONESIA MENGAKU BERBANGSA YANG SATU, BANGSA INDONESIA.

Ketiga : KAMI PUTRA DAN PUTRI INDONESIA MENJUNJUNG BAHASA PERSATUAN, BAHASA INDONESIA.

Setelah mendengar putusan ini kerapatan mengeluarkan keyakinan azas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan kebangsaan Indonesia.

Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya:

KEMAUAN

SEJARAH

BAHASA

HUKUM ADAT

PENDIDIKAN DAN KEPANDUAN,

dan mengeluarkan pengharapan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan.”

Dikutip dari buku *45 Tahun Sumpah Pemuda* (Jakarta: Yayasan Gedung-gedung Bersejarah Jakarta, 1974), hal. 69

BAHASA INDONESIA DAN INTEGRASI NASIONAL

Achmad MUGALIH

PENDAHULUAN

Bahasa memainkan peranan penting dalam proses untuk integrasi nasional. Bahasa memberikan kepada rakyat suatu jalan untuk saling berhubungan dan mempersatukan mereka. Banyak bangsa di dunia lahir berdasarkan bahasa. Bangsa-bangsa Eropa adalah contoh yang terbaik dalam proses ini. Dari sudut geografis seluruh Benua Eropa dapat dipandang sebagai suatu kesatuan. Tetapi kenyataan bahwa berbagai bahasa dipakai oleh berbagai kelompok melahirkan golongan-golongan di benua tersebut. Akibatnya lahirlah bangsa-bangsa yang berlainan. Hanya dalam abad yang lalu dan pada permulaan abad ini lahirlah berbagai bangsa merdeka di peta Eropa. Dasar lahirnya bangsa-bangsa itu adalah suatu bahasa yang dipakai oleh rakyatnya yang berbeda daripada bahasa yang dipakai oleh bangsa-bangsa tetangganya.

Di Asia proses "nation-building" tidak banyak ditentukan oleh dasar bahasa. Dasarnya adalah bahwa banyak Bangsa Asia telah mencapai persatuan nasional beberapa abad yang lalu. Persatuan nasional dipermudah oleh perkembangan politik dan sejarah. Cina, India dan Indonesia telah mengalami proses persatuan dan integrasi selama abad-abad yang lalu sebab proses persatuan dan integrasi politik dan administratif di bawah pemerintah kerajaan-kerajaan yang besar dan berkuasa telah

menjadi kenyataan sejarah dan geografis. Eropa sebagai suatu kesatuan tidak pernah diperintah oleh suatu kerajaan untuk masa lebih dari satu abad. Lain halnya di Asia, benua ini telah mengenal kerajaan-kerajaan Cina, India dan Indonesia selama beberapa abad. Hal ini memungkinkan tercapainya persatuan politik bangsa-bangsa tersebut pada jaman modern meskipun pada dasarnya negara-negara tersebut memakai berbagai bahasa atau multi-lingual.

Para ahli bahasa menekankan pentingnya bahasa bagi suatu bangsa untuk mencapai persatuan bangsa. Negara-negara kolonial telah memakai faktor bahasa untuk kepentingannya sendiri dan negara-negara itu telah berhasil untuk menguasai wilayah-wilayah yang luas di Asia dan Afrika dengan jalan memisahkan suku-suku bangsa menurut bahasa, agama dan adat. Usaha itu telah melahirkan berbagai suku bangsa di masa kolonial. Akan tetapi dengan bangkitnya bangsa-bangsa Asia pemisahan-pemisahan yang dibuat itu dapat dihancurkan dengan cepat oleh pergerakan kebangsaan dan kemerdekaan. Perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia, khususnya yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Indonesia dan India, membuktikan bahwa rakyat sanggup berkorban untuk mencapai kemerdekaannya. Karena pentingnya persatuan dan kemerdekaan maka bangsa India dan bangsa-bangsa lain yang baru merdeka, masih memakai bahasa bangsa bekas penjajah sebagai bahasa resmi setelah mencapai kemerdekaannya hanya dengan tujuan pokok untuk kepentingan persatuan dan kemerdekaan. Berlainan halnya dengan Bangsa Indonesia sebab Bangsa Indonesia telah menunjukkan kesetiaannya kepada bahasa-bahasa daerah dan menerima Bahasa Melayu sebagai bahasa penghubung meskipun bahasa ini dipakai oleh minoritas. Dari kedua contoh itu dapat dilihat besarnya semangat berkorban, semangat kebangsaan dan kemauan untuk bersatu.

BAHASA INDONESIA SEBAGAI BAHASA NASIONAL

Di negara kita Bahasa Indonesia telah memainkan peranan yang positif dalam proses integrasi bangsa. Lain dari itu

bahasa tersebut telah mempercepat perjuangan kemerdekaan dan telah memberikan kepada Bangsa Indonesia semangat persatuan. Peranan bahasa itu patut diakui dalam proses "Nation Building" di negara kita. Bahasa Indonesia telah menjadi unsur penting dalam persatuan dan kedudukan kita sebagai bangsa. Tetapi kenyataan itu bukanlah hal baru. Selama beberapa abad bangsa kita telah memakai bahasa persatuan itu dalam kegiatan-kegiatan perdagangan. Abad ke-XX telah mengulang sejarah kerajaan-kerajaan dagang di wilayah kepulauan ini. Tetapi pelabuhan-pelabuhan entrepot, pusat-pusat perdagangan dan istana kerajaan telah melahirkan suatu bahasa penghubung yang memainkan peranan penting dalam proses persatuan dan integrasi bangsa dan negara kita dalam sejarah. Kenyataan ini dipahami benar oleh kaum nasionalis muda selama perjuangan untuk melawan penjajahan Belanda dan mereka telah menerima Bahasa Melayu yang telah dipakai dalam kegiatan-kegiatan perdagangan itu sebagai bahasa persatuan.

Asal Bahasa Indonesia adalah Bahasa Melayu yang dipakai di propinsi-propinsi Sumatra Utara, Sumatera Barat dan Riau dan di pantai Semenanjung Melayu yang berhadapan dengan propinsi-propinsi tersebut. Di samping Bahasa Melayu ini yang juga disebut Bahasa Melayu Tinggi, timbulah Bahasa Melayu Rendah atau Melayu Pasar. Bahasa ini bukanlah Bahasa Melayu murni tetapi mengandung kata-kata asing yang dimasukkan dari bahasa-bahasa lain oleh kaum pedagang yang berlayar melalui Selat Malaka selama beberapa abad. Bahasa Melayu Rendah itu yang menerima kata-kata Tamil, Gujarat, Arab, Persia, Portugis dan Belanda, dipakai di kota-kota pelabuhan di wilayah kepulauan Indonesia.

Lahirnya Bahasa Melayu sebagai lingua franca di wilayah ini haruslah dihubungkan dengan peranan Kerajaan Sriwijaya yang berkuasa dari abad ke-VII hingga abad ke-XII setelah Masehi. Dalam masa itu mulailah Bahasa Melayu dipakai di seluruh kepulauan Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, daerah-daerah yang memakai Bahasa Melayu, terletak di kedua belah Selat Malaka dan di sekitar Laut Cina Selatan,

yaitu di jalan-jalan terpenting sebelum orang memasuki wilayah Indonesia lainnya dan di satu-satunya jalan penghubung antara negara-negara Barat dan Timur Jauh. Kedua, karena Bangsa Melayu mempunyai kepandaian dan kebiasaan berlayar dan berdagang, mereka merantau dan hidup terpisah dari tempat asalnya hampir tiap-tiap tahun penuh. Ketiga, Palembang dan Malaka, yang merupakan pusat-pusat perdagangan, adalah tempat-tempat yang berbahasa Melayu.¹

Adalah suatu kenyataan bahwa di masa wilayah kepulauan Indonesia dijajah oleh suatu bangsa asing baik di bidang politik atau di bidang kebudayaan, bahasa bangsa asing itu lambat laun dipakai oleh golongan atas, umpamanya Bahasa Sanskrit di masa Hindu, Bahasa Arab di masa berkuasanya Islam, Bahasa Belanda di masa Belanda dan Bahasa Jepang di masa Jepang. Akan tetapi, karena susunan bahasa asing itu berbeda dari bahasa rakyat setempat dan kenyataannya hanya dipakai oleh golongan kecil, maka barang tentu di samping bahasa asing itu bahasa aseli tetap dipakai oleh rakyat setempat.²

BAHASA MELAYU DI MASA PENJAJAHAN BELANDA

Dalam abad-abad ke-XVIII dan ke-XIX politik Belanda memakai Bahasa Melayu dengan maksud untuk mengadakan hubungan dengan rakyat dan dengan demikian memperkuat keduukannya. Dalam hubungan ini pemerintah percaya kepada dua buah peribahasa yaitu: "Bahasa itu membentuk Bangsa" dan "Bahasa itu sama dengan rakyat".³

Politik ini dijalankan juga oleh Pendeta Kristen dan Mubaligh Islam untuk menyebarkan agamanya dengan memakai Bahasa Melayu Tinggi. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur bahasa Jawa lebih banyak dipakai. Bahasa Jawa agak sulit dipelajari karena perbendaharaan kata-kata disesuaikan dengan tingkat-

1 Lihat S. Takdir Alisjahbana, *Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia* (Jakarta, 1949), halaman 3

2 *Ibid.*

3 Lihat J.E. Hoffman, "The Malay Language as a Force for unity in the Indonesian Archipelago, 1815-1900", *Nusantara*, 14 Juli 1973, halaman 22

tingkat sosial sedangkan Bahasa Melayu adalah sederhana dan demokratis. Untuk memajukan Bahasa Melayu pemerintah mendirikan pada tahun 1908 sebuah "Commissie voor de Inlandse School en Volkslectuur" (Panitia untuk Sekolah Pribumi dan Bacaan Rakyat) yang bertugas tidak saja untuk menyusun berbagai buku pelajaran sekolah, tetapi juga untuk memilih dan menerbitkan karangan-karangan untuk keperluan rakyat dalam Bahasa Melayu Tinggi dan bahasa-bahasa daerah lainnya. Pada tahun 1917 panitia itu berubah menjadi kantor tetap bernama "Balai Pustaka" yang namanya masih dipakai setelah kemerdekaan Indonesia. Sebuah daftar yang menyebutkan nama beberapa buah buku karangan diberikan di bawah ini:¹

1. *Pertemuan* oleh A.S. Pamuncak Nan Sati (1927),
2. *Si Cebol rindukan bulan* oleh Aman Datuk Majoindo (1934),
3. *Sebab Rafiah tersesat* oleh A. Dt. Majoindo dan S. Harjosumarto (1935),
4. *Kehilangan Mestika* oleh Hamidah (1935),
5. *Tenggelamnya kapal van der Wijck* oleh H.A.M.K. Amrullah (1938).

Hingga tahun 1942 kantor itu telah menerbitkan lebih-kurang 2000 buah buku dan penerbitan-penerbitan kecil serta majalah-majalah yaitu *Sari Pustaka*, *Panji Pustaka* dan *Kejawen*. Dengan demikian kantor Balai Pustaka telah memberikan kesempatan kepada pengarang-pengarang Bangsa Indonesia untuk menulis yang hasilnya menguntungkan perkembangan Bahasa Indonesia.

Pemakaian Bahasa Melayu juga digalakkan oleh badan-badan hukum bukan pemerintah. Sekolah-sekolah Taman Siswa yang didirikan pada tahun 1922 oleh Suwardi Suryoningrat dan pembantu-pembantunya yang memakai bahasa-bahasa Belanda dan Melayu sebagai bahasa pengantar, menerbitkan sebuah almanak tahunan yang memuat juga karangan-karangan dalam Bahasa Melayu. Pada tahun 1895 di Surakarta didirikan sebuah

¹ Lihat Asis Safiudin dan Ramaini, *Galian Sastra* (Jakarta, 1974), halaman 51

surat kabar, bernama *Retnodumilah*, yang terbit dua kali seminggu dan memakai bahasa-bahasa Jawa dan Melayu. Surat kabar ini disusul oleh surat kabar *Darmo Kondho* pada tahun 1899 yang terbit tiga kali seminggu dalam bahasa-bahasa Jawa dan Melayu. *Budi Utomo* menerbitkan sebuah surab kabar harian dalam tiga bahasa, yaitu Jawa, Melayu, dan Belanda, mulai tahun 1920 hingga tahun 1924.¹

Pemakaian Bahasa Melayu diusahakan lebih lanjut oleh seorang ahli bahasa bernama A.F. Von de Wall yang menyusun kamus Melayu-Belanda. Kamus ini diterbitkan dalam empat jilid berturut-turut pada tahun-tahun 1877, 1880, 1884 dan 1897. Berikutnya adalah sebuah daftar mengenai kamus-kamus Melayu-Belanda lainnya:

1. *Algemeen Hollandsch-Maleisch Woordenboek* oleh P.P. Roorda van Eysinga (1877),
2. *Nieuw Hollandsch-Maleisch, Maleisch-Hollandsch Woordenboek* oleh H.L. Hadings (1879),
3. *Maleisch-Nederlandsch Woordenboek* oleh H.C. Klinkert (1902),
4. *Hollandsch-Maleisch, Maleisch-Hollandsch Woordenboek* oleh H.L.J. Badings (1912),
5. *Maleisch Zakwoordenboekje* oleh T.T. Bezemer (1932),
6. *Maleisch Woordenboek* oleh P.H.S. van Ronkel (1939).

Patut pula diketahui bahwa pendeta-pendeta Kristen telah menyusun sejumlah besar kamus Bahasa Melayu dan bahasa-bahasa daerah lainnya. Perjanjian Baru diterbitkan dalam Bahasa Melayu pada tahun 1731 dan Perjanjian Lama pada tahun 1733.

Pemakaian Bahasa Melayu telah menarik pula banyak perhatian perkumpulan-perkumpulan pemuda terutama di Jawa. Pada permulaan abad ke-XX banyak pelajar dari pulau-pulau di luar Jawa seperti Sumatera, Sulawesi, Maluku dan Bali dikirim ke Jawa untuk melanjutkan pelajarannya di sekolah menengah

¹ Lihat Suripan Sadi Hutomo, *Telaah Kesusasteraan Jawa Modern* (Jakarta, 1975), halaman 9

atau di perguruan tinggi. Pada tahun-tahun pertama mereka berada di Jawa pelajar-pelajar itu kurang bergaul secara bebas dengan pelajar-pelajar setempat karena perasaan kedaerahan masih sangat kuat. Karena itu mereka tidak memasuki perkumpulan-perkumpulan pemuda setempat tetapi membentuk perkumpulannya sendiri dengan maksud untuk memelihara kepribadiannya seperti bahasa dan unsur-unsur kebudayaan lainnya.

Pada masa itu perkumpulan-perkumpulan pelajar yang pertama adalah *Jong Sumatera* (seorang pemimpinnya adalah Nasir Datuk Pamoncak), *Jong Minahasa* (pemimpinnya adalah Alex Andries Maramis), dan *Trikoro Darmo- Jong Java* (seorang pemimpinnya adalah Achmad Soebarjo). Dari kenyataan-kenyataan itu teranglah bahwa para pemuda terpisah-pisah menurut suku-suku yang ada. Patutlah diketahui bahwa pemimpin-pemimpin pemuda dan pelajar itu akan mempersatukan diri dalam satu organisasi apabila mereka melanjutkan pelajarannya di Negeri Belanda.

Apabila kita membicarakan pergerakan pemuda dan pelajar dan perkembangan Bahasa Melayu menjadi bahasa nasional maka peranan mereka di Negeri Belanda patut mendapat perhatian. Mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang pertama datang di negara itu pada tahun 1908 telah mendirikan sebuah perkumpulan, disebut *Indische Vereniging* (Perhimpunan Hindia) dengan asas dan tujuan sosial dan budaya. Di antara mereka terdapat pemuda-pemuda yang kemudian akan menduduki jabatan-jabatan tertinggi atau menjadi pemimpin-pemimpin politik di Republik Indonesia seperti Mohammad Hatta (Wakil Presiden), Achmad Subarjo (Menteri Luar Negeri), Ali Sastroamijoyo (Perdana Menteri), Sartono (Ketua Parlemen) dan lain-lain. Apabila dibandingkan dengan kehidupan mahasiswa-mahasiswa yang tinggal di Indonesia maka mahasiswa-mahasiswa di Negeri Belanda itu lebih bergantung satu kepada yang lain sebab mereka terpisah jauh dari orang tua dan keluarga lainnya untuk waktu yang sangat lama. Karena itu mereka dengan mudah mempersatukan diri menjadi satu kelompok dengan perasaan nasional

yang kuat dan menjauhkan perasaan kedaerahannya mereka. Perhimpunan mereka yang semula bersifat sosial, kemudian mempunyai sikap politik setelah pada tahun 1915 pemimpin-pemimpin partai politik *Indische Partai* tiba di Negeri Belanda, yaitu Suwardi Suryaningrat (kemudian bernama Ki Hajar Dewantoro), Dr. Cipto Mangunkusumo dan Dr. E.F.E. Douwes Dekker. Mereka dikirim ke Negeri Belanda untuk menjalani hukuman disebabkan kegiatan-kegiatan politik yang dipandang mengganggu kekuasaan Pemerintah Belanda. Partainya yang didirikan pada tahun 1913 adalah partai politik yang pertama di Indonesia. Maka mungkin karena pengaruh pemimpin-pemimpin tersebut nama lama *Indische Vereniging* diubah menjadi *Indonesische Vereniging* (1922-1925) dan kemudian diganti lagi menjadi *Perhimpunan Indonesia*.¹ Mulai tahun 1925 perhimpunan ini menerbitkan sebuah majalah bernama *Indonesia Merdeka* yang memakai dua bahasa, Bahasa Melayu dan Bahasa Belanda. Melalui majalah tersebut dan media lainnya mahasiswa-mahasiswa itu memainkan peranan penting dalam membimbing dan mempengaruhi para pemuda di Indonesia dalam usaha untuk mempertebal perasaan nasional dengan tujuan integrasi nasional. Hasil majalah-majalah itu demikian besarnya sehingga Pemerintah mengambil kebijaksanaan untuk mengadakan sensor terhadap bahan-bahan itu dan bahkan melarang masuknya ke Indonesia.²

Dalam hubungan ini para mahasiswa dan pemuda di Indonesia tidak tinggal diam dan pada bulan Februari 1927 mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama *Jong Indonesia*, yang bertujuan untuk mempersatukan semua mahasiswa dan pemuda ke dalam satu organisasi, yang kemudian mengadakan konferensi yang pertama di Bandung pada tanggal 25 dan 26 Desember 1927. Konferensi ini menyetujui untuk membentuk semacam federasi, bernama *Pemuda Indonesia*, yang mempersatukan

¹ Lihat Achmad Subarjo Joyoadisuryo, "Kenang-kenangan akan Saudara Muhammad Hatta", dalam *Bung Hatta Mengabdi Pada Cita-cita Perjuangan Bangsa* (Jakarta, 1972), halaman 117-137

Lihat Dr. H. Ruslan Abdulgani, "Sekelumit Catatan Pribadi dari Gudang Kenang-kenangan", dalam *Bung Hatta Mengabdi Pada Cita-cita Perjuangan Bangsa* (Jakarta, 1972), halaman 49-60

semua organisasi mahasiswa dan pemuda. Lain dari itu disetujui pula untuk menerima Bahasa Melayu sebagai bahasa penghubung resmi yang dinamakan *Bahasa Indonesia*. Arti penting dari keputusan-keputusan tersebut adalah bahwa suatu bahasa daerah yang dipakai oleh lebih-kurang seperdua-puluh atau 4,97 persen dari jumlah penduduk Indonesia diterima sebagai bahasa nasional. Hal ini dapat tercapai oleh kesediaan suku-suku yang besar untuk membatasi perasaan kedaerahannya agar supaya mencapai cita-cita yang lebih tinggi yaitu persatuan Bangsa Indonesia.¹ Dengan demikian jalan untuk mencapai integrasi kebudayaan yang lengkap telah terbuka. Berhubung dengan hasil-hasil tersebut suatu konperensi yang bersejarah diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 26 sampai tanggal 28 Oktober 1928. Dalam pertemuan tersebut diikrarkanlah *Sumpah Pemuda* untuk pertama "mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia"; kedua "mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia"; ketiga "menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia". Pada kesempatan itu pula lagu kebangsaan, *Indonesia Raya*, diperdengarkan untuk pertama kali oleh penciptanya Wage Rudolf Supratman.

Peristiwa pada tanggal 28 Oktober 1928 itu merupakan suatu tonggak penting dalam sejarah Bangsa Indonesia karena dapat dilihat sebagai hari lahirnya Bangsa dan Bahasa Indonesia.²

Dalam perkembangan bahasa Indonesia selanjutnya patut disebutkan peranan majalah bulanan *Pujangga Baru* yang didirikan pada tahun 1933 oleh S. Takdir Alisyahbana, Armijn Pane dan Amir Hamzah. Adapun tujuannya adalah memberikan semangat baru ke dalam kesusastraan, kesenian dan kehidupan masyarakat pada umumnya.

BAHASA MELAYU DI MASA JEPANG

Pada waktu Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942 Bahasa Indonesia secara nyata telah diterima oleh Bangsa Indo-

¹ Lihat Prof. Slametmulyana, *Politik Bahasa Nasional* (Jakarta, 1959), halaman 12

² Lihat Harjito, *Risalah Gerakan Pemuda* (Jakarta, 1952), halaman 13

nesia sebagai bahasa nasional. Oleh karena itu dengan alasan politis dan praktis bahasa ini dipakai sebagai bahasa resmi sedangkan Bahasa Belanda dilarang secara keras. Lain dari itu politik Jepang juga bertujuan untuk memakai Bahasa Jepang sebagai bahasa resmi yang kedua. Oleh karena itu bahasa ini diajarkan sebagai mata pelajaran pokok di semua sekolah. Meskipun pelajaran bahasa ini digemari khususnya oleh generasi muda, akan tetapi untuk mencapai hasil-hasil yang diharapkan mungkin diperlukan satu generasi. Oleh karena itu Pemerintah terpaksa membantu perkembangan Bahasa Indonesia. Berhubungan dengan itu Bahasa Indonesia dipakai sebagai:

1. bahasa resmi oleh kantor-kantor Pemerintah,
2. bahasa pengantar di semua sekolah,
3. bahasa resmi oleh mass media seperti radio, film dan surat kabar.

Selanjutnya untuk memenuhi keperluan pendidikan dan ilmu pengetahuan, buku-buku pelajaran disusun dalam Bahasa Indonesia dalam waktu pendek dan sejumlah buku yang berbahasa Belanda diterjemahkan. Lain dari itu pemerintah telah membentuk berbagai panitia yang bertugas untuk menyusun kata-kata baru mengenai bidang-bidang yang diperlukan. Dalam rangka ini kata-kata baru telah diambil dari bahasa-bahasa daerah dan juga dari bahasa-bahasa asing terutama Bahasa Arab dan Bahasa Belanda. Dengan demikian, meskipun dasar Bahasa Indonesia adalah Bahasa Melayu, Bahasa Indonesia dapat dinamakan suatu bahasa baru sebab bahasa itu adalah hasil dari proses assimilasi antara Bahasa Melayu dan beberapa bahasa lainnya.¹

BAHASA INDONESIA DALAM MASA KEMERDEKAAN

Sumpah Pemuda tahun 1928 yang telah menerima Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah hal yang sangat penting untuk menentukan politik yang dijalankan mengenai bahasa tersebut. Pada tahun 1945 setelah proklamasi kemerdekaan keputusan Sumpah Pemuda itu dicantumkan dalam Undang-

¹ Lihat Prof. Slametmulyana, *op. cit.*, halaman 34

undang Dasar Republik Indonesia pasal 36 yang mengatakan bahwa "Bahasa Negara adalah Bahasa Indonesia". Dengan demikian pasal tersebut memberikan dasar hukum sehingga Bahasa Indonesia dapat dipakai sebagai bahasa resmi dan sebagai sarana komunikasi di seluruh Indonesia.

Berhubung dengan itu pada tahun 1945 di Medan telah diadakan Kongres Bahasa Indonesia yang antara lain menyetujui bahwa Bahasa Indonesia telah tumbuh dan berkembang dengan Bahasa Melayu sebagai dasar dan bahwa dalam proses itu Bahasa Indonesia telah diperkaya oleh bahasa-bahasa lain, terutama oleh bahasa-bahasa daerah yang terdapat di Indonesia.¹ Perlu diketahui bahwa pada tahun 1938 telah diadakan suatu pertemuan di Surakarta dengan tujuan untuk membicarakan dasar-dasar bagi perkembangan Bahasa Indonesia. Karena dokumentasi pertemuan tersebut belum lengkap maka hasil yang lengkap tidak diketahui. Karena pertemuan itu dianggap sebagai Kongres Bahasa yang pertama maka Kongres Bahasa Indonesia di Medan dinamakan Kongres Bahasa Indonesia ke-II.

Adapun Kongres Bahasa ke-III yang diadakan di Jakarta mulai tanggal 30 Oktober hingga tanggal 3 Nopember 1978 telah menghasilkan beberapa keputusan dalam hubungan dengan pembinaan dan pengembangan Bahasa Indonesia serta pengembangan bahasa daerah. Mudah-mudahan keputusan-keputusan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan yang terkandung dalam jiwa para pemuda yang ikut dalam pertemuan "Sumpah Pemuda" limapuluh tahun yang lalu dapat mencapai hasil yang nyata dan bahkan ditingkatkan lebih tinggi lagi.

Perlu diketahui bahwa perjuangan dan segala usaha untuk menyempurnakan kedudukan dan kegunaan Bahasa Indonesia telah mendapat tanggapan yang positif dari banyak negara asing. Kecuali di negara-negara tetangga, Bahasa Indonesia juga diajarkan di sekolah bahasa atau perguruan tinggi di kota-kota besar yaitu di Tokyo, Peking, New Delhi, Calcutta, New York,

¹ Lihat Amran Halin, "Fungsi Politik Bahasa Nasional", dalam *Politik Bahasa Nasional Ke-I* (Jakarta, 1976), halaman 6

Moskwa, Warsawa, Praha, Berlin, Utrecht, Leiden, Paris, Venetia, Kairo dan kota-kota lain.¹ Dengan demikian Bahasa Indonesia telah menjadi suatu bahasa dunia yang baru di samping bahasa-bahasa Inggris, Perancis, Spanyol, Russia, Mandarin, Jerman dan Arab. Kedudukan dan hasil yang baik itu tidak akan dicapai jika Sumpah Pemuda itu tidak berlangsung. Karena itu kita wajib menyatakan hormat dan terima kasih kepada para pemuda Indonesia yang secara langsung maupun tidak langsung ikut serta dalam pertemuan yang bersejarah itu. Bahasa Indonesia selain merupakan unsur kebudayaan yang penting, juga menjadi unsur pemersatu Bangsa Indonesia.

¹ Lihat Prof. Slametmulyana, *op. cit.*, halaman 19

PANCASILA DAN KEBUDAYAAN NASIONAL INDONESIA*

Kirdi DIPOYUDO

Pancasila sebagai dasar falsafah negara, pandangan hidup dan moral bangsa Indonesia, yang terdiri atas nilai-nilai yang menjadi norma atau pedoman tingkah laku manusia dan negara Indonesia, adalah bagian inti serta jiwa kebudayaan nasional Indonesia dan landasan ideal pengembangannya. Berkat peranan Pancasila dalam pengembangan kebudayaan itu, kebudayaan nasional Indonesia menjadi semacam panglima seluruh kehidupan masyarakat dan negara yang mengarahkan dan memimpinnya ke tujuannya, yaitu kesejahteraan lahir batin selengkap mungkin bagi setiap dan semua warganya.

PANCASILA INTI KEBUDAYAAN INDONESIA

Dalam artinya yang lengkap kebudayaan adalah keseluruhan pikiran, karya dan hasil karya manusia sebagai anggota masyarakatnya yang tidak berakar pada nalurinya dan hanya dapat dikuasai atau dihasilkannya dalam suatu proses belajar. Dalam arti ini kebudayaan adalah ungkapan kehidupan manusia dan masyarakatnya yang mengolah alam lingkungannya untuk mempertahankan dan mengembangkan eksistensinya dan mencakup segala perbuatan manusia. Dengan demikian kebudayaan

* Karangan ini ditulis untuk ikut menyambut 50 tahun *Sumpah Pemuda* yang dapat dilihat sebagai lahirnya Bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia

bukanlah semata-mata sekumpulan barang dan karya kesenian, buku, bangunan dan lain sebagainya, melainkan juga dan pertama-tama kegiatan manusia membuat alat-alat dan benda-benda tersebut, adat istiadat, tata-cara, cara mengasuh anak, sistem-sistem sosial, pranata-pranata sosial dan lain sebagainya. Termasuk pula kegiatan manusia mengadakan pembaruan-pembaruan di segala bidang guna meningkatkan mutu hidupnya. Ciri khasnya ialah kemampuan manusia untuk belajar dan menemukan sesuatu baru demi perbaikan kehidupannya. Oleh sebab itu kebudayaan dapat dibatasi sebagai keseluruhan penemuan manusia demi perbaikan hidup manusiawi. Kebudayaan harus selalu mempunyai nilai hidup, artinya harus selalu mengabdi kepada kehidupan manusiawi. Dalam rangka meningkatkan mutu hidup itu manusia menciptakan teknik-teknik dan organisasi-organisasi termasuk negara untuk meningkatkan efisiensi kerja guna mencapai hasil sebanyak mungkin dengan tenaga yang tersedia. Manusia selalu berusaha memperbaiki keduanya itu dalam pembaruan-pembaruan dan penemuan-penemuan baru.¹

Setiap kebudayaan terdiri atas banyak unsur yang biasa dibagi dalam tujuh kelompok yang disebut universalia budaya (cultural universals) karena bersifat universil, yaitu peralatan dan perlengkapan hidup manusia atau teknologi, mata pencarian dan sistem-sistem ekonomi, sistem-sistem sosial, bahasa, kesenian, ilmu pengetahuan dan religi termasuk moralnya.² Berkat semuanya itu manusia dapat hidup aman dan mengembangkan dirinya serta mewujudkan kesejahteraan lahir batinnya.

1 Mengenai kebudayaan terdapat banyak definisi yang berbeda satu sama lain tetapi juga mengandung banyak unsur bersama. Dalam *Culture, A Critical Review of Concepts and Definitions* (Cambridge, Mass., 1952) A.L. Kroeber dan Cn Kluckhohn mengumpulkan 160 definisi, menganalisisnya dan mencari intinya serta membaginya dalam berbagai golongan. Umuinnya kebudayaan diambil dalam artinya yang luas dan menyeluruh. Lihat antara lain Milton Singer, "The Concept of culture", dalam David L. Sills, Ed., *International Encyclopedia of the Social Sciences*, III, (New York — London, 1972), hal. 527-541

2 Lihat Prof. Dr. Koentjaraningrat, *Pengantar Anthropologi* (Jakarta, 1969³), hal. 77-79; dan C. Kluckhohn, "Universal categories of culture", dalam *Anthropology Today*, 1953, hal. 507-523

Dalam Penjelasan pasal 32 UUD 1945 ditandaskan bahwa "Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi-daya Rakyat Indonesia seluruhnya"¹ Dengan perkataan lain, subyek kebudayaan nasional Indonesia adalah seluruh rakyat Indonesia, bukan suku bangsa ini atau suku bangsa itu. Secara tersirat itu berarti bahwa kebudayaan nasional Indonesia baru muncul dengan terbentuknya rakyat Indonesia. Sebelumnya yang ada ialah kebudayaan-kebudayaan daerah. Dengan demikian kebudayaan nasional Indonesia masih muda dan sedang pada tahap penyusunan dan pengembangan, biarpun unsur-unsurnya sudah tua. "Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa", demikian Penjelasan pasal 32 UUD 1945 tersebut lebih lanjut.² Artinya, kebudayaan nasional Indonesia terdiri atas unsur-unsur kebudayaan-kebudayaan daerah yang dapat dinilai sebagai puncak-puncaknya. Unsur-unsur yang baik diambil alih dan dikembangkan, sedangkan unsur-unsur yang kurang baik secara berangsur-angsur disingkirkan. Dalam GBHN 1978 ditetapkan sehubungan dengan Wawasan Nusantara: "Bawa Budaya Indonesia pada hakekatnya adalah satu; sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya Bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan Budaya Bangsa seluruhnya."³ Dengan demikian kebudayaan nasional Indonesia adalah bhinneka tunggal ika, satu tetapi beraneka ragam.

Nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila adalah bagian inti kebudayaan nasional Indonesia itu. Moral Pancasila bukanlah semata-mata satu bagian di samping bagian-bagian lain kebudayaan kita, melainkan bagian inti dan jiwanya. Moral Pancasila mengarahkan kebudayaan kita pada tujuannya dan memberikan dimensi manusiawi kepadanya. "Bentuk-bentuk kebudayaan sebagai pengejawantahan Pribadi Manusia Indonesia harus benar-benar menunjukkan nilai-nilai hidup dan makna kesusilaan yang dijiwai Pancasila", demikian ditetapkan dalam

¹ Dikutip dari Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945*, 1 (Jakarta, 1971²), hal. 44-45

² *Ibid.*

³ Dikutip dari *Himpunan Ketetapan-ketetapan MPR 1978* (Jakarta: Pantjoran Tudjuh, 1978), hal. 82

GBHN 1978 tersebut.¹ Berkat peranan Pancasila itu kebudayaan nasional Indonesia akan dapat memegang peranan yang diharapkan, yaitu sebagai panglima kehidupan bangsa Indonesia. Dalam arti itu kebudayaan nasional dapat berfungsi sebagai strategi kehidupan masyarakat dan negara Indonesia dan secara demikian menjamin tercapainya tujuan-tujuan nasional kita.²

PANCASILA DASAR PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

Oleh sebab itu moral Pancasila adalah juga dasar atau landasan ideal pengembangan kebudayaan nasional Indonesia. Sesuai dengan itu dalam GBHN 1978 ditandaskan bahwa "Kebudayaan nasional harus dibina atas dasar norma-norma Pancasila dan diarahkan pada penerapan nilai-nilai yang tetap mencerminkan kepribadian bangsa dan meningkatkan nilai-nilai yang luhur"³

Pertama-tama hal itu berarti bahwa moral Pancasila merupakan pedoman evaluasi dan seleksi atau penyaringan unsur-unsur budaya yang digunakan untuk menyusun dan mengembangkan kebudayaan kita. Unsur-unsur dari kebudayaan-kebudayaan daerah yang bertentangan dengan Pancasila harus ditolak dan disingkirkan secara berangsur-angsur, sedangkan unsur-unsurnya yang sesuai dengan sila-silanya dipelihara dan dikembangkan. Oleh sebab itu ditandaskan dalam GBHN bahwa "perlu ditiadakan dan dicegah nilai-nilai sosial budaya yang bersifat feudal dan kedaerahan yang sempit". Hal itu juga berlaku bagi unsur-unsur kebudayaan-kebudayaan asing karena dalam pembentukan kebudayaan nasional Indonesia kita harus terbuka. Dalam Penjelasan pasal 32 UUD 1945 ditandaskan bahwa usaha kebudayaan kita "tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkannya atau memperkaya kebudayaan sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia."⁴ Juga dalam hal ini moral

1 *Ibid.*, hal. 91

2 Lihat C.A. Van Peursen, *Strategi Kebudayaan* (Jakarta, 1976), khususnya hal. 9-33

3 Dikutip dari *Himpunan Ketetapan-ketetapan MPR 1978* (Jakarta: Pantjuran Tudjuh, 1978), hal. 114

4 Dikutip dari Muhammad Yamin, *op. cit.*, hal. 45

Pancasila berfungsi sebagai pedoman. Dengan perkataan lain, kita harus menolak unsur-unsur yang bertentangan dengan Pancasila tetapi bersedia menyerap unsur-unsur positif yang sesuai dengan sila-silanya. Sehubungan dengan itu dalam GBHN 1978 ditandaskan: "Dengan tumbuhnya kebudayaan nasional yang berkepribadian dan berkesadaran maka sekaligus dapat ditanggulangi pengaruh kebudayaan asing yang negatif, sedang di lain pihak ditumbuhkan kemampuan masyarakat untuk menyaring dan menyerap nilai-nilai dari luar yang positif dan yang memang diperlukan bagi pembaruan dalam proses pembangunan."¹

Semuanya itu berarti bahwa kita harus terbuka untuk akulturasi. Dari sejarah kita tahu bahwa kebudayaan yang menutup dirinya dan menolak pertukaran dengan kebudayaan-kebudayaan lain biasanya macet dan ketinggalan jaman. Akulturasi adalah perlu bagi setiap kebudayaan, tidak hanya untuk berkembang tetapi juga untuk bertahan. Pancasila adalah hasil akulturasi serupa itu seperti ditandaskan oleh Presiden Soeharto pada Hari Ulang Tahun ke-XXIV PARKINDO di Surabaya tanggal 15 Nopember 1969: "Pancasila sebenarnya bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan telah melalui proses yang panjang, dimatangkan oleh sejarah perjuangan Bangsa kita sendiri, melihat pengalaman-pengalaman bangsa-bangsa lain, diilhami oleh ide-ide besar dunia, dengan tetap berakar pada kepribadian Bangsa kita sendiri dan ide besar Bangsa kita sendiri."² Dengan perkataan lain, Pancasila adalah pusaka lama yang tumbuh dari jiwa dan kebudayaan bangsa Indonesia, tetapi telah berkembang di bawah ilham ide-ide besar dunia sehingga dapat menjadi dasar falsafat negara modern, lagi pula berfungsi sebagai pangkal pembaruan lebih lanjut untuk membangun masa depan bangsa yang lebih baik. Pancasila menolak pendirian sempit yang enggan mengambil unsur-unsur asing, tetapi juga menolak pendirian ekstrim lainnya, yang terlalu bersemangat untuk meniru segala sesuatu yang datang dari dunia barat dan mengacaukan modernisasi dengan westernisasi. Hal ini ditandaskan oleh Presiden Soeharto pada Upacara Peringatan

¹ *Himpunan Ketetapan-ketetapan MPR 1978* (Jakarta: Pantjuran Tudjuh, 1978), hal. 114

² Dikutip dari Krissantono, Ed., *Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila* (Jakarta: CSIS, 1976), 10

Ulang Tahun ke-XXV Universitas Gajah Mada tanggal 19 Desember 1974 sebagai berikut: "Dan jika dikatakan bahwa pembangunan memerlukan pembaruan, maka pembaruan ini sama sekali bukan 'pembaratan' (westernisasi), yang akan berarti penerapan kebudayaan lain yang asing bagi kita. Pembaruan tidak lain adalah usaha bagi bangsa sendiri untuk secara bagaimana mengembangkan kepribadiannya sendiri, dengan membuang yang buruk dan menguatkan yang baik, mengadakan penyesuaian dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan masyarakat modern."¹

Kedua, Pancasila adalah pedoman pengarahan pengembangan kebudayaan kita agar kebudayaan nasional kita benar-benar dapat memainkan peranannya yang sangat penting untuk memberi arah dan membimbing seluruh pembangunan nasional kita. Dalam hubungan ini perlu dicatat, bahwa kebudayaan bukanlah semata-mata salah satu bidang kehidupan masyarakat dan negara di samping bidang-bidang lainnya seperti politik, ekonomi dan sebagainya, melainkan seluruh kehidupan bangsa yang mencakup bidang-bidang itu. Dengan demikian kebudayaan adalah strategi kehidupan masyarakat dan negara serta pembangunan nasional kita. ² Agar berhasil pembangunan nasional kita harus diberi dimensi budaya. Dan hal ini terjadi dengan melaksanakan sila-sila Pancasila secara murni dan konsekuensi dalam bidang-bidang tersebut. Secara konkret itu berarti menyusun dan melaksanakan politik Pancasila, ekonomi Pancasila, sistem sosial Pancasila, sistem hukum Pancasila dan lain sebagainya, yang sebagai keseluruhan dapat disebut masyarakat Pancasila yang pada hakikatnya adalah masyarakat manusiawi. "Mewujudkan suatu masyarakat manusiawi (humane society) adalah sasaran terakhir seluruh pengembangan kebudayaan", demikian ditandaskan dalam deklarasi yang dikeluarkan di Yogyakarta pada 19 Desember 1973 oleh Konperensi Menteri-menteri Kebudayaan Asia. ³ Yang dimaksud dengan masyarakat

1 *Pidato Presiden Republik Indonesia Jendral Soeharto pada Upacara Peringatan Ulang Tahun ke-XXV Universitas Gajah Mada 19 Desember 1974 di Yogyakarta* (Jakarta: Departemen P dan K, 1975), hal. 5-6

2 Lihat Van Peursen, *op. cit.*, hal. 10

3 Laporan Konperensi, hal. 18

kat manusiaawi ialah suatu masyarakat yang memungkinkan setiap dan semua warganya hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya sebaik mungkin dan mewujudkan kesejahteraan lahir batinnya. Pancasila menempatkan manusia sebagai subyek dan tujuan masyarakat dan negara maupun pembangunan nasional.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas ini kiranya dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, oleh sebab kebudayaan nasional Indonesia harus dibangun atas dasar moral Pancasila, maka dalam evaluasi dan seleksi unsur-unsur yang digunakan untuk menyusun dan menyempurnakan kebudayaan nasional Indonesia, moral Pancasila adalah norma tertinggi. Unsur-unsur yang melanggar atau merugikannya harus ditolak dan secara berangsur-angsur disingkirkan. Selain itu Pancasila harus menjawai segala bidang kehidupan masyarakat dan negara, dan dengan maksud itu dituangkan dalam peraturan-peraturan perundangan yang mengaturnya. Secara demikian bidang-bidang itu tidak akan menghambat atau merugikan kehidupan susila rakyat, tetapi menunjang atau memungkinkannya.

Kebudayaan nasional Indonesia berorientasi pada manusia dengan menempatkannya sebagai subyek dan tujuan kehidupan masyarakat dan negara. Manusia diakui sebagai pribadi yang mempunyai martabat mulia dan hak-hak azasi yang harus dijun-jung tinggi. Dengan perkataan lain kebudayaan kita harus memungkinkan setiap dan semua warga masyarakat hidup wajar sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mencapai kesejahteraan lahir batinnya selengkap mungkin secara merdeka sesuai dengan katalahinya. Dengan demikian kebudayaan kita mempunyai makna kesusilaan.

Dengan maksud itu pengembangan kebudayaan kita harus berarti pembangunan kembali masyarakat kita menjadi masyarakat manusiaawi. Masyarakat Pancasila yang kita cita-citakan dan perjuangkan pada hakikatnya adalah masyarakat manusia-

ANALISA

wi, suatu masyarakat di mana martabat dan hak-hak asasi setiap warganya dijunjung tinggi (kepastian hukum) dan tersedia bagi-nya barang-barang dan jasa-jasa keperluan hidup secukupnya (kemakmuran umum). Masyarakat serupa itu juga melihat bangsa-bangsa lain sebagai sesama warga umat manusia dan bekerja-sama dengan mereka untuk membangun dunia baru yang lebih baik atas dasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

DAFTAR PUBLIKASI — CSIS

I. SERI BUKU

1. Some Basic Thoughts on the Acceleration and Modernization of 25 Years Development, Ali MOERTOPO	a Rp. 1.250,—
2. Dasar-dasar Pemikiran tentang Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 Tahun, Ali MOERTOPO	
3. Dua pemikiran tentang Pertahanan Keamanan dan Strategi Nasional, Daoed JOESOEOF	a Rp. 1.000,—
4. The World of Strategy and the Foreign Policy of Nation	
5. Economic Development and National Resilience, R.B. SOEHARTONO	a Rp. 500,—
6. Persoalan Masa Kini: Perusahaan-perusahaan Multinasional, J. PANGLAYKIM	a Rp. 1.500,—
7. Strategi Politik Nasional, Ali MOERTOPO	a Rp. 1.000,—
8. Business Relations between Indonesia and Japan, J. PANGLAYKIM	
9. Indonesia dan Dunia Internasional 1974	a Rp. 500,—
10. Trends in Marketing, J. PANGLAYKIM	a Rp. 1.750,—
11. Regionalism in Southeast Asia	a Rp. 1.000,—
12. Buruh dan Tani dalam Pembangunan, Ali MOERTOPO	a Rp. 1.250,—
13. Seminar Strategi Pembinaan Pengusaha Swasta Nasional	a Rp. 400,—
14. Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila (edisi luks)	a Rp. 2.000,—
15. Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila (edisi biasa)	a Rp. 1.200,—
16. Self Reliance and National Resilience	a Rp. 300,—
17. Second Indonesian — Japanese Conference	a Rp. 1.250,—
18. Indonesia dan Dunia Internasional 1975	a Rp. 1.500,—
19. Indonesia dan Dunia Internasional 1976	a Rp. 4.000,—
20. Sistem Pendidikan dan Pengembangan Kewirausahaan di Indonesia	a Rp. 5.000,—
21. Japan — Indonesia Relations in the Context of Regionalism in Asia	a Rp. 2.000,—
22. Indonesia's Economic and Business Relations with ASEAN and Japan, J. PANGLAYKIM	a Rp. 1.500,—
23. Timur Tengah dalam Pergolakan, Kirdi DIPOYUDO	a Rp. 3.000,—
24. Afrika dalam Pergolakan, Kirdi DIPOYUDO	a Rp. 1.500,—
25. Southeast Asia and the World of Tomorrow	a Rp. 1.500,—
26. Strategi Kebudayaan, Ali MOERTOPO	a Rp. 3.000,—
27. Indonesia dan Dunia Internasional 1977	a Rp. 750,—
28. P-4 and GBHN (bhs Inggris)	a Rp. 5.000,—
29. Japan — Indonesia Cooperation : Problems and Prospects	a Rp. 600,—
	Rp.1.500,—

II. TERBITAN BERKALA

1. RINGKASAN PERISTIWA (terbit setiap 2 minggu)	a Rp. 350,—	Rp. 10.000,— pcr tahun
2. ANALISA (terbit setiap bulan)	a Rp. 700,—	Rp. 8.000,— per tahun
3. MONOGRAF	a Rp. 700,—	
4. THE INDONESIAN QUARTERLY (terbit setiap 3 bulan)	a Rp. 800,—	Rp. 3.200,— per tahun

DAFTAR PUBLIKASI CSIS

Pesanan dengan pembayaran di muka. Untuk Seri Buku, pesanan luar kota ditambah ongkos kirim ± 15%; dialamatkan pada: CSIS, Biro Publikasi, Jalan Kesehatan 3/13, Jakarta Pusat, telepon 349489

DAFTAR ISI ANALISA

TAHUN V, 1976

1. EKONOMI DUNIA DAN SISTEM KINGSTON

- N. ARSJAD, *Ciri-ciri Ekonomi Dunia Dasawarsa Tahun-tahun Tujuhpuluh an*
- N. ARSJAD, *Kingston System: Sistem Moneter Internasional Baru*

2. ASEAN: PROSPEK DAN PERMASALAHANNYA (I)

- J. PANGLAYKIM, *Kerjasama Ekonomi — Perdagangan ASEAN Beberapa Tanggapan atas Konsep ASEAN Free Trade Area*
- J. Soedjati DJIWANDONO, *ASEAN Sesudah KTT*

3. ASEAN: PROSPEK DAN PERMASALAHANNYA (II)

- J. PANGLAYKIM, *Wilayah Perdagangan Selektif ASEAN: Suatu Kemungkinan Bentuk Kerjasama Ekonomi ASEAN*
- J. PANGLAYKIM, *Suatu Pemikiran Bagaimana Dapat Menilai Iklim Investasi di Negara-negara ASEAN dan Asia Umumnya*
- Daoed JOESOEF, *Renungan Mengenai Masalah Free Trade*

4. EKONOMI DAN MASYARAKAT MANUSIAWI

- Pintor SIMANDJUNTAK, *Strategi Kebutuhan Pokok*
- Tjipto SOEMARTONO, *Peranan Profesi Kedokteran dalam Menunjang Proses Akselerasi Modernisasi*
- Daoed JOESOEF, *Masalah Pola Industri, Sekuriti dan Independensi Ekonomi Nasional*

5. BUDAYA DAN PENDIDIKAN

- A.M.W. PRANARKA, *Merintis Jalan menuju Tata Dunia Yang Lebih Manusiawi*
- A.M.W. PRANARKA, *Elite En Massa — Suatu Catatan tentang Tulisan Prof. W.F. WERTHEIM*
- S. HARTO, *Kapasitas dan Produktivitas Perguruan Tinggi Kita masih Rendah*
- S. HARTO, *Beberapa Catatan Sekitar Masalah: Kuliah Kerja Nyata*

6. UTARA — SELATAN & TIMUR — BARAT

- N. ARSJAD, *Peranan UNCTAD dan OPEC: Kerjasama atau Konfrontasi?*
- O. Abdul RACHMAN, *Perspektif Sekuriti di Samudra Indonesia*

7. PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN ANGGARAN BELANJA NEGARA

- Soedjono HOEMARDANI, *Peranan Pengawasan dalam Pembangunan*
- Rufinus LAHUR, *Catatan Mengenai "Waktu Pengajuan" Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU—APBN)*

8. NON—ALIGNMENT

- A.R. SUTOPO, *Non-Alignment dan Partisipasi Indonesia*
- Kirdi DIPOYUDO, *Suatu Tinjauan atas Gerakan Non-Blok*

9. NEGARA NON—BLOK DAN MASALAH HABITAT

- N. ARSJAD, *Negara-negara Non-Blok dan Masalah Ekonomi Dunia*
- Onny S. PRIYONO, *Habitat dalam Perspektif Hubungan Manusia*

10. SURIAH DI LIBANON DAN PENYELESAIAN RASIAL

- Kirdi DIPOYUDO, *Intervensi Suriah dalam Perang Saudara di Libanon*
- Kirdi DIPOYUDO, *Menuju Perdamaian Rasial di Afrika bagian Selatan*

II. MASALAH DANA INTERNASIONAL & NASIONAL

- N. ARSJAD, *Sidang Tahunan IMF — Bank Dunia 1976*
- J. PANGLAYKIM, *Kelambatan Perkembangan lembaga-lembaga Keuangan Nasional akan Memperbesar Ketergantungan pada Bank-bank Internasional*

12. BEBERAPA TINJAUAN TAHUN 1976

- Rufinus LAHUR, *Tinjauan Mengenai Beberapa Segi Daya Fungsional Aparatur Pelaksana Menjelang Tahun 1977*
- Kirdi DIPOYUDO, *Kompetisi Superpower di Benua Afrika*
- A.M.W. PRANARKA, *Situasi Sosial — Budaya Indonesia 1976*

TAHUN VI, 1977

1. BEBERAPA PROSPEK PERKEMBANGAN TAHUN 1977

- Kirdi DIPOYUDO, *Perkembangan di Afrika Bagian Selatan*
- A.R. SUTOPO, *Masalah Komunisme di Negara-negara ASEAN*
- Kirdi DIPOYUDO, *Perkembangan Politik Dunia Arab*
- N. ARSJAD, *Perkembangan Dana Pinjaman Internasional dan Pengaruhnya pada Perekonomian Indonesia*

2. ASIA TENGGARA: PERKEMBANGAN DAN PROSPEKNYA

- Ali MOERTOPO, *Perkembangan di Asia Tenggara dalam Bidang Politik, Ekonomi dan Strategi dengan Titik Berat Khusus pada Hari Depan ASEAN*
- Kirdi DIPOYUDO, *Asia Tenggara dan Prospeknya: Suatu Tinjauan Umum*
- Parlaungan SIBARANI, *Sekitar Kepulauan Paracel dan Spratly*
- Bing P. LUKMAN, *Renungan Satu Tahun KTT ASEAN Bali*

DAFTAR PUBLIKASI CSIS

3 + 4 BEBERAPA SEGI PEMBANGUNAN

- Rufinus LAHUR, *Organisasi Politik "Hasil Pembaharuan dan Penyederhanaan Kehidupan Politik"*
- F.X. SOEDIJANA, *Hukum Ekonomi*
- Ramzy TAJUDIN, *Strategi Akseptabilitas Sosial Organisasi*
- H. Anton DJAWAMAKU, *Agropolis: Pembangunan Desa dan Pengembangan Wilayah di Daerah Pedesaan*
- A. Rahman RANGKUTI, *Pengembangan Padi Gogo dalam Peningkatan Produksi Beras*
- Kirdi DIPOYUDO, *Demokrasi Pancasila*

5. KEPINCANGAN HUBUNGAN UTARA — SELATAN

- J. PANGLAYKIM, *Dengan Persetujuan Pemasaran Yang Serba Diatur, Negara-negara Industri Mau Menang Sendiri*
- J. PANGLAYKIM, *Perspektif Pertemuan Puncak London*
- N. ARSJAD, *Kerjasama Ekonomi Internasional Masa Kini dan Masalahnya: Dialog Utara — Selatan*
- J. PANGLAYKIM, *Keuntungan Lebih Besar Yang Dicapai Bank-bank Amerika Karena Bisnisnya Dengan Dunia Ketiga*

6 + 7 BEBERAPA PERKEMBANGAN INTERNASIONAL

- A.R. SUTOPO, *Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam SALT: Mencari Perimbangan Persenjataan Strategis*
- Kirdi DIPOYUDO, *Perimbangan Kekuatan Baru di Asia Tenggara*
- O. ABDULRACHMAN, *Kawasan Timur Tengah Tak Kunjung Damai*
- Bing P. LUKMAN, *Gerakan Euro-Komunisme dan Supremasi Komunis Uni Soviet*
- Kirdi DIPOYUDO, *Pergolakan di Kawasan Laut Merah*

8. PERKEMBANGAN ASEAN

- Bing P. LUKMAN, *Menjelang Dasawarsa ASEAN: Suatu Tinjauan Kultural*
- N. ARSJAD, *Membangun Masyarakat Ekonomi ASEAN: Mungkinkah Dicapai?*
- Bing P. LUKMAN, *Indocina Sparing Partner ASEAN*
- Christianto WIBISONO, *Perspektif Kompetisi Indonesia — Vietnam*
- A.R. SUTOPO, *Masalah Minoritas Muslim di Pilipina Selatan: Prospek Penyelesaian yang Menyeluruh*

9. GENERASI MUDA

- Pande Radja SILALAHI, *Generasi Muda dalam Strategi Pembangunan di Masa Depan*
- S. HARTO, *Partisipasi Mahasiswa dalam Pembangunan Pedesaan*
- S. HARTO. *Perguruan Tinggi Swasta dalam sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia: Suatu Tinjauan, tentang Masalah Pembinaan dan Pengembangannya.*

10. JEPANG DAN POLITIK EKONOMI LUAR NEGERINYA

- J. PANGLAYKIM, *Perubahan-perubahan Politik dan Konsep Kerjasama, Keamanan dan Perbatasan Ekonomi Jepang*
- Pande Radja SILALAHI, *Pandangan Jepang terhadap ASEAN Berubah?*
- J. PANGLAYKIM, *Doktrin Fukuda: Suatu Pandangan Bisnis*

11. BEBERAPA MASALAH DALAM NEGERI

- Rahman RANGKUTI, *Masalah Peningkatan Produksi Beras*
- F.X. SOEDIJANA, *Kebijaksanaan Perburuhan dalam Penanaman Modal Asing*
- N. ARSJAD, *Pasar Uang dan Pasar Modal di Indonesia: Perkembangan, Masalah dan Hambatannya*
- S. HARTO, *Masalah "Kultur Oposisi" dalam Demokrasi Pancasila*

12. BEBERAPA ULASAN TAHUN 1977

- Kirdi DIPOYUDO, *Timur Tengah Fokus Perhatian Dunia Tahun 1977*
- S. HARTO, *Masalah Kebebasan Ilmiah dan Kebebasan Mimbar pada Perguruan Tinggi*
- Rufinus LAHUR, *Tinjauan Dalam Negeri Tahun 1977*

TAHUN VII, 1978

1. PERSPEKTIF 1978

- J. PANGLAYKIM, *Indonesia dan Fokus Bisnis Internasional dalam Tahun 1978*
- Kirdi DIPOYUDO, *Perlombaan Timur-Barat di Kawasan Samudera Hindia*
- N. ARSJAD, *Masalah Krisis Dollar Amerika Serikat dan Pengaruhnya atas Nilai Rupiah*

2. VIETNAM—KAMBOJA, SELAT MALAKA & MASALAH RASIAL

- A.R. SUTOPO, *Beberapa Segi Konflik Vietnam-Kamboja: Menuju Hegemoni Kawasan?*
- Asnani USMAN, *Kedudukan Selat Malaka Sebagai Perairan Teritorial dan Jalur Pelayaran Internasional ditinjau dari Segi Politik Internasional*
- Kirdi DIPOYUDO, *Masalah Rasial di Afrika Selatan*

3. PANCASILA ARTI DAN PENERAPANNYA

- Kirdi DIPOYUDO, *Negara dan Ideologi Negara-Suatu Pengantar*
- Kirdi DIPOYUDO, *Pancasila Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*
- Kirdi DIPOYUDO, *Pancasila Moral Bangsa Indonesia-Suatu Pengantar*
- Christianto WIBISONO, *Menuju Sistem Ekonomi Pancasila*

ANALISA

4. DINAMIKA HUBUNGAN INTERNASIONAL

- Otto ABDULRACHMAN, *Dinamika dalam Hubungan Internasional*
- James CHACE, *Strategi Pembendungan Baru Amerika*
- Ali MOERTOPO, *Hubungan Mendatang antara Amerika Serikat Dan Asia Tenggara: Suatu Perspektif Asia Tenggara*
- Kirdi DIPOYUDO, *Menuju Penyelesaian Damai Masalah Namibia*

5. KEBUDAYAAN DAN PENDIDIKAN

- Daoed JOESOEOF, *Era Pengembangan Kebudayaan dan Kaitannya dengan Pendidikan*
- Daoed JOESOEOF, *Pendidikan, Kebudayaan dan Pembentukan Manusia*
- Kirdi DIPOYUDO, *Pelembagaan Pola Hidup Sederhana*
- Onny S. PRIJONO, *Suatu Dilemma untuk Ibu-ibu yang Bekerja*

6. STRATEGI GLOBAL DAN ASIA TENGGARA

- Jusuf WANANDI, *Segi-segi Politik-Keamanan Asia Tenggara*
- Hadi SOESASTRO, *Arah Percaturan Politik antara Uni Soviet dan RRC serta Pengaruhnya terhadap Asia Pada Umumnya dan Asia Tenggara pada Khususnya*
- Jusuf WANANDI, *Situasi Strategis Dunia dan Posisi Amerika Serikat serta Hubungannya dengan Asia Tenggara*

7. BEBERAPA SEGI PEMBANGUNAN NASIONAL

- Kirdi DIPOYUDO, *Pancasila Moral Bangsa Indonesia — Arti Materiilnya*
- C.P.F. LUHULIMA, *Tempat-tempat Ilmu Sosial dan Kemanusiaan dalam Pengembangan Sistem Ilmu dan Teknologi Nasional — Suatu Pemikiran*
- J. PANGLAYKIM, *Wiraswasta [Entrepreneur] dan Perusahaan-perusahaan Pertumbuhan dan Pembangunan Sebagai Faktor Pertumbuhan Ekonomi Nasional*
- O. Sutomo ROESNADI, *Pengaruh Lingkungan Internasional terhadap Masalah Pembangunan di Dalam Negeri*

8. BERBAGAI MASALAH DALAM NEGERI

- B. HOESSEIN, *Penentuan Batas-batas Wilayah Administrasi/Daerah Otonom : Suatu Pemikiran Berorientasi pada Pembangunan*
- B. DARUS, *Pola Pembangunan Desa Pantai (Coastal Area Development) — Program Tiga Tahun Pembangunan Desa Pantai Propinsi Sumatera Utara*
- Hadi SOESASTRO, *Pasaran Obligasi Internasional sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan*
- Christianto WIBISONO, *Manajemen ABRI "Gaya M. Yusuf"*

9. NEGARA—NEGARA ASEAN

- M. PATHMANATHAN, *Dinamika Politik Kerjasama ASEAN*
- Endi RUKMO, *Hubungan antara Negara-negara ASEAN dan RRC*
- A.S. NATABAYA, *Suatu Tinjauan mengenai Prinsip Nusantara (Archipelagic Principles) dalam Hubungannya dengan Kepentingan Indonesia*
- Asnani USMAN, *Perjuangan Indonesia untuk Prinsip Nusantara (Archipelagic Principles)*

DAFTAR PUBLIKASI CSIS

10. SUMPAH PEMUDA DAN PERSATUAN INDONESIA

- SUNARIO, *Arti Sumpah Pemuda, Nasional dan Internasional*
- Abdurrahman SURJOMIHARDJO, *Sumpah Pemuda di dalam Perkembangan Budaya-Politik Indonesia 1900-1945 — sebuah Iktisar*
- Kirdi DIPOYUDO, *Menggalang Persatuan Bangsa Indonesia*
- Achmad MUGALIH, *Bahasa Indonesia dan Integrasi Nasional*
- Kirdi DIPOYUDO, *Pancasila dan Kebudayaan Nasional Indonesia*

11. PERSAINGAN TIMUR — BARAT

- *Persaingan Amerika Serikat — Uni Soviet, Khususnya di Dunia Ketiga*
- Wiratmo Soekito, *Akan Dapatkah Uni Soviet mengadakan Finlandisasi Politik Luar Negeri Amerika Serikat?*
- Kirdi DIPOYUDO, *Uni Soviet dan Afrika*
- Kirdi DIPOYUDO, *Hubungan Kekuatan Global Amerika Serikat — Arab Saudi*

MONOGRAF

1. J. PENGLAYKIM, BEBERAPA PEMIKIRAN TENTANG MEMPERTINGGI KAPABILITAS DAN KAPASITAS BANK-BANK SWASTA NASIONAL	Rp. 700,—
2. A.M.W. PRANARKA, SITUASI KULTURIL DUNIA DEWASAINI	Rp. 700,—
3. KWIK Kian Gie, KREDIT MACET, DILEMMA MASA KINI	Rp. 700,—
4. Jusuf WANANDI, KEBIJAKAN LUAR NEGERI PRESIDEN CARTER DAN PERANAN KONGRES AS	Rp. 700,—

Berlangganan ANALISA - Anda berarti memetik keuntungan.

Apabila Anda berminat mendapatkan ANALISA harga tiap eks Rp. 700,- masih ditambah ongkos kirim sekitar 15 %. Tapi bila Anda memilih untuk menjadi Pelanggan ANALISA, maka untuk langganan setahun (12 nomor penerbitan) Anda cukup hanya membayar Rp. 8.000,- sudah termasuk ongkos kirim. Istimewa bagi Mahasiswa akan memperoleh potongan khusus 10 % untuk langganan setahun (sertakan foto copy Kartu Mahasiswa Anda). Catatkan dari sekarang nama Anda sebagai Pelanggan ANALISA sekaligus mengirim uang langganannya.

FORMULIR LANGGANAN

Harap dicatat sebagai Pelanggan ANALISA

N a m a : _____

Alamat : _____

Universitas * : _____

Untuk langganan selama setahun (12 nomor) mulai nomor : _____

Bersama ini kami kirim uang langganan Rp. 8.000,-/Rp. 7.200,-*
melalui pos wesel atau _____

Mengetahui **

Pelanggan,

* khusus untuk Mahasiswa

** cap dan tanda tangan pihak Fakultas

Kirimkan Formulir ini kepada :

Centre for Strategic and International Studies

up. Biro Publikasi, Jl. Kesehatan 3/13 Jakarta Pusat, Telp. : 349489

MAJALAH ANALISA, RINGKASAN PERISTIWA, THE INDONESIAN QUARTERLY dan BUKU-BUKU CSIS dengan mudah bisa Anda dapatkan di

MEDAN : TB Dcli; PEKANBARU: TB Penyalur Berita; PADANG: TB Pancaran Ilmu, TB Pustaka Anggrek; PALEMBANG: TB Sriwijaya; JAKARTA: TB Ichtiar, TB Gramedia, TB Tropen, TB Gunung Agung. TB BPK Gunung Mulia, TB Tamaddun, TB Tintamas; TB Djambatan; TB Kinta; TB Marco; TB Pradjnaparamita, Bursa Buku Fak. Ekonomi UI; TB Jayakarta, TB Pelita, TB Indira; BANDUNG: TB Sumur Bandung, TB Karyat Nusantara, TB Djawa, TB Gramedia; SEMARANG: TB Merbabu, TB Surya, TB Gajah Mada; JOGJAKARTA: TB Hien Hoo Sing, TB Kedaulatan Rakyat, TB Pem-bangunan; MAGELANG: TB Kedaulatan Rakyat; SURAKARTA: TB Budhilaksana; MALANG: TB Atoom; SURABAYA: TB Sari Agung; UJUNGPANDANG: TB Bhakti Baru, Hasanuddin University Press; IRIAN JAYA: TB Gunung Agung; DENPASAR: TB Sumber Agung



CSIS juga menyediakan perpustakaan dan clippings yang terbuka untuk pencinta pengetahuan, analis dan peneliti dengan koleksi yang eksklusif, penyediaan data yang lengkap dan informasi yang cepat.

Penerbitan-penerbitan tersebut di atas dapat diperoleh di Toko-toko Buku, atau langsung pada: Biro Publikasi — CSIS

CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES
Jl. Keschatan 3/13, Jakarta Pusat Telepon 349489